

ANALISIS PERBANDINGAN CORAK PEMIKIRAN ETIKA POLITIK

IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ALBA ROMA TRIWIJAYA

NPM. 1421020048

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M

**ANALISIS PERBANDINGAN CORAK PEMIKIRAN ETIKA POLITIK
IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ALBA ROMA TRIWIJAYA

NPM. 1421020048

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Seorang penguasa politik atau pemimpin wajib menjalankan amanat dari pemberi amanat (rakyat) dan menetapkan hukum secara adil. Hal tersebut akan menciptakan kondisi dan situasi yang baik untuk sebuah lingkungan masyarakat. Maka tidak mudah menjadikan seseorang pemimpin yang baik. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa seorang pemimpin harus memahami makna dari sebuah etika politik, bukan hanya sekedar memahami saja tetapi juga mempraktekkan semua apa yang telah dipahami oleh pemimpin tentang etika politik. Karena, ini menjadi pondasi awal untuk terciptanya negara kesejahteraan.

Dalam hal ini, penulis akan mencoba memahami etika politik dari dua tokoh muslim yang dapat dijadikan rujukan referensi teori politik Islam, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Dua tokoh Islam ini memiliki kehidupan pada masa yang berbeda dan situasi yang juga dapat dikatakan beda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana corak etika politik menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dan bagaimana persamaan dan perbedaan etika politik menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui corak etika politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan etika politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, makalah, yang sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menggambarkan secara objektif materi yang diteliti. Analitik dipergunakan untuk mendapatkan dan mengetahui implikasi dari ide etika politik dalam Islam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa corak pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah harus tegaknya syariat Islam dan corak pemikiran etika politik Ibnu Khaldun harus seimbang urusan dunia maupun akhirat. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki persamaan pemikiran etika politik sepakat bahwa seseorang pemimpin sebagai pemecah permasalahan warga negaranya, mendirikan negara sebuah keharusan, dan keadilan sebuah tujuan dalam penyelenggaraan negara. Adapun perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang etika politik. Pertama, mengenai seseorang pemimpin, Ibnu Taimiyah memfokuskan terhadap kemampuan seseorang pemimpin, sedangkan Ibnu Khaldun seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki dukungan dari warga negaranya. Kedua, mengenai konsep bentuk negara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bentuk negara tidak diatur dalam Islam, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bentuk negara adalah kerajaan, republik, dan Khilafah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

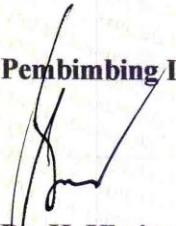
Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Alba Roma Triwijaya
NPM : 1421020048
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN CORAK PEMIKIRAN
ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH DAN IBNU
KHALDUN

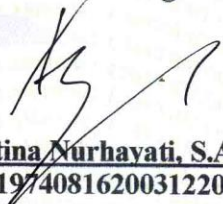
MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)


Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PERBANDINGAN CORAK PEMIKIRAN
ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN** disusun oleh
Alba Roma Triwijaya, NPM.1421020048, Program Studi : Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Selasa, 31 Juli 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom.I. (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

DEKAN



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196609011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِدُّكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa : 58)*¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Surakarta: Al-Karim, 2009), hlm. 88.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan pada orang-orang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya :

1. Mas Supriyanto dan Rosita sebagai Papa dan Mamaku tercinta yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan membesarkanku dengan doa disetiap langkah, serta selalu mengajarkan aku dari kecil yang benar-benar polos hingga dewasa saat ini untuk selalu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Untuk kakak pertamaku Awalludin Rosy Anwar, ayukku perempuan satu-satunya Ayu Kusuma Wardani, S.Pd, adikku Arjuna Rangga Dinata, ayuk iparku teteh Rista dan Keluarga besarku yang telah banyak membantu materil maupun moril serta masukan hingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapainya cita-cita.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Alba Roma Triwijaya. Penulis dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 01 Februari 1995, anak ketiga dari empat bersaudara, diantaranya Awalludin Rosy Anwar, Ayu, Kusuma Wardani, dan Arjuna Rangga Dinata, putra dari pasangan bapak Mas Supriyanto, dan Ibu Rosita.

Jenjang pendidikan penulis yaitu :

1. Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri I, Desa Candimas, Lampung Utara lulus pada tahun 2008
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri II, Kotabumi, Lampung Utara lulus pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN I Lampung Utara) lulus pada tahun 2014. Semasa di MAN penulis aktif dibidang PMR sebagai ketua PMR MAN 1 Lampung Utara
4. Pada tahun 2014 penulis diterima di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi antara lain:
 - a. Kader PMII UIN Komisariat UIN Raden Intan Lampung.
 - b. HMJ Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) sebagai Koordinator Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai syarat salah satu memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas semua bantuan pihak, rasa hormat terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada mahasiswa.
3. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Agustina Nurhayati S.Ag M.H. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar

yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku ketua jurusan Siyasah dan Frenki, M.Si. selaku sekretaris jurusan, terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah medidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini;
7. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan Fakultas dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
8. Untuk Nur Ainny S.H., terimakasih selalu menemani, membantu dan memberikan semangat serta motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini.
9. Untuk yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini yaitu sahabat seperjuangan Fitria Wulandari, S.H., Anton Kurnia Mardiansyah, Faisal Abdaoe, Rendy Yusa Ambara, Virgi Ernanda, Juwita Permatasari, Sulthan Bin Tahir, Yan Pamawi Syaban, Teguh Hermawan, Dewi Agustina, Fitri Apriyanti, Anjeli Adelia Febnalani Zahara, Ari Hermawan, Oky Oktavian, dan Rangga Saputra. S.Kom.
10. Untuk keluarga besar Siyasah B angkatan tahun 2014 yang tak dapat kusebut satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya.

11. Untuk teman-teman seperjuangan Brudul yang tak dapat kusebut satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya.
12. Untuk teman-teman KKN kelompok 58 yang tak dapat kusebut satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, mengingat kemampaun yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 17 Juli 2017

Penulis

Alba Roma Triwijaya

NPM.1421020048

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Etika Politik Islam	15
B. Prinsip-prinsip dan dasar Hukum Etika Politik Islam	20
C. Corak-corak Etika Politik Islam	27
D. Pendapat berbagai Tokoh tentang Etika Politik Islam	31

BAB III BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN SERTA CORAK PEMIKIRAN ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN

A. Ibnu Taimiyah dan Corak Pemikiran Etika Politiknya	40
1. Biografi Ibnu Taimiyah	40
2. Karya-karya Ibnu Taimiyah	47
3. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Etika Politik	50
B. Ibnu Khaldun dan Corak Pemikiran Etika Politiknya	59
1. Biografi Ibnu Khaldun	59

2. Karya-karya Ibnu Khaldun	63
3. Pendapat Ibnu Khaldun tentang Etika Politik	66

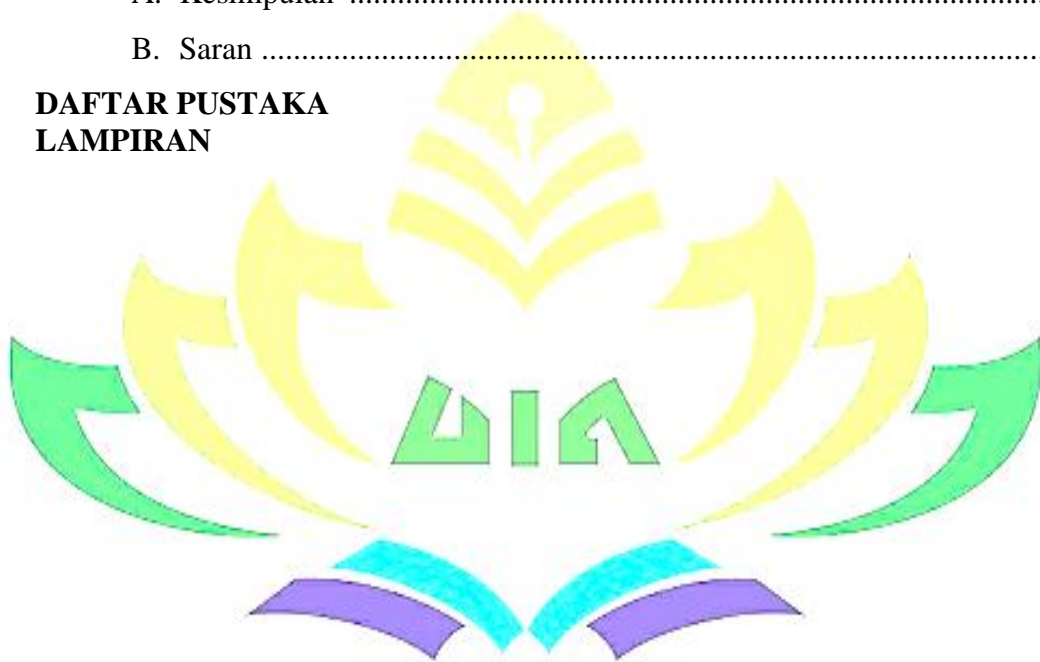
BAB IV ANALISIS

A. Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun	73
B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA **LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah **Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun**. Judul tersebut terdiri dari istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

Analisis perbandingan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan², serta kegiatan untuk mengadakan identifikasi persamaan/perbedaan antara dua gejala atau lebih.³

Corak pemikiran etika politik adalah kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, untuk mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.⁴

Ibnu Taimiyah, nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abu-‘Abbas bin ‘Abd Al-Hakim bin ‘Abd As-Salam (661-728 H). Ia dilahirkan di Bahrain dan hijrah ke Damaskus bersama ayahnya pada tahun 667 H. Ia tumbuh dan

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Balai Pustaka, Tahun 2002), hlm.43.

³ S. Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm.10.

⁴ Franz Magniz Suseno. *Etika Politik*, cet VII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum 2003), hlm. 8.

belajar kepada tokoh-tokoh disana. Ia tokoh puncak dalam keilmuan dunia keilmuan, amaliyah, kemuliaan, keberanian, kerendahan hati, kesabaran, kewibawaan, keagungan, keikhlasan, dan keteguhannya dalam mempedomani hadits-hadits Nabi SAW. Ibnu Taimiyah dianggap sebagai pedang dihadapan para penentang agama dan mengetarkan nyali para ahli bid'ah.⁵

Ibnu Khaldun, nama lengkap Ibnu Khaldun adalah 'Abd Ar-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Abd Ar-Rahman bin Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan pada tahun 723 H (27 Mei 1332 M) dan wafat di Kairo pada 25 Ramadhan tahun 808 H (19 Maret 1406).⁶

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah sebagai pembahasan dengan pengkajian yang meneliti tentang perbandingan corak pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi, antara lain :

1. Secara Objektif

Untuk mengetahui pemikiran etika politik menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk mengetahui pemikirannya tentang etika politik.

⁵ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.3.

⁶ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm, 413.

2. Secara Subjektif

- a. Pembahasannya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menambah wahana keilmuan bagi penulis pada umumnya, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena banyak literatur yang berkaitan dengan skripsi ini, sehingga pembahasannya sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Kata “Etika” kerap sekali muncul, terutama dalam kehidupan berpolitik yang meliputi proses persoalan publik dalam politik maupun proses pembuat keputusan. Proses ini yang melahirkan dua faktor yaitu, pengembangan kelompok sosial, dan karakteristik hubungan struktural dalam kelompok. Menurut Anthoni Giddens, dalam merumuskan susunan masyarakat ada dua hal yang perlu diperhatikan, keduanya saling bertautan, yaitu struktur sosial, dan tindakan manusia. Pertautan ini, melahirkan etika politik yang memiliki standar nilai yang berlaku, berlangsung secara teratur dan berpola pada satu kaidah tertentu.⁷

Dari ungkapan persoalan diatas, kata “Etika” terkait erat dengan pertanyaan bagaimana seharusnya hidup, apa yang membuat sebuah tindakan

⁷ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum; Esai-Esai Ilmiah untuk Pembaruan*, (Yogyakarta: Madyan press, 2002), hlm. 102.

menjadi benar dan salah, dan serta apa tujuan dari sebuah tindakan.⁸ Pertanyaan tersebut mempertanyakan apakah perbuatan itu etis atau tidak dalam artian normatif. Dalam tataran filsafat, etika dipahami tidak hanya sebatas aspek normatif saja dalam perilaku, melainkan lebih pada motivasi tindakan dan cara berpikir. Dengan asumsi bahwa pengetahuan etika merupakan pengetahuan tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan, sikap apa yang harus dan tidak harus dilakukan, atau sedang dan ingin dilakukan, maka etika terkait erat dengan cara berpikir manusia pada umumnya. Cara berpikir itulah yang melahirkan tindakan dan perilaku.⁹

Dengan demikian, cara berpikir, tindakan dan praktek perilaku seseorang, akan sangat dipengaruhi kondisi sosial budaya dan historis. Dalam kontek sosial historis, sebuah keputusan etika di ambil untuk mengatasi sebuah masalah. Dalam mengatasi persoalan, etika menjadi sebuah standar prosedur untuk membuat satu keputusan untuk menyelesaikannya. Etika dalam bentuknya sebagai sebuah prosedur keputusan dalam situasi konflik, menjelma sebagai ungkapan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam politik.

Sementara itu, dalam keputusan politik Islam, etika muncul dalam setiap mengambil sebuah keputusan dari suatu persoalan, tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirugikan atau sebaliknya, satu pihak yang diuntungkan. Dalam politik Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan agama samawi terakhir dari seluruh rangkaian kenabian sejak Nabi

⁸ Peter Sirger (ed), *Ethics*, (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 3.

⁹ M. Amin Abdullah, *Antara Al- Ghozali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 38.

Adam, diyakini sebagai agama yang sempurna, lengkap, dan mengatur segala dimensi kehidupan manusia sepanjang zaman, dan batasan-batasan yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia.¹⁰

Agama yang diyakini membawa panduan hidup, baik didunia maupun diakhirat, yang memiliki cara hidup, aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Agama merupakan suatu sistem untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku politik.¹¹

Untuk itu diperlukanlah hukum yang mengaturnya, dan etika sebagai esensi dari berdirinya hukum tersebut. Etika dan hukum di orientasikan untuk mengatur dinamika kehidupan yang dibuat oleh manusia, melalui mekanisme dan prosedur yang sudah disepakati bersama. Berbeda halnya dengan cara pandangan kaum (tradisional), norma moral dan hukum baik yang bersifat publik maupun individu didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif *Ilahiyah* yang mempunyai watak sakral dan perlu diperbarui secara ritual.¹²

Dalam logika agama, dasar aturan hukum dan moral selain Tuhan adalah bentuk pengingkaran. Itulah sebabnya kaum fundamentalis (pemahaman Barat) kekuasaan dan kedaulatan Tuhan berarti Tuhan merupakan satu-satunya pembuat hukum.¹³ Oleh karena itu, kaum

¹⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 1.

¹¹ Nidal R. Sabrin dan M. Hisyam Jabar, *Etika Bisnis dan Akuntan*, dalam Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 230.

¹² Sindhunata, *Berfilsafat di Tengah Merebaknya Teror*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 62.

¹³ Khalid Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* terj. Gita Ayu Rahmani dan Ruslani, (Jakarta: Ufuk, 2004), hlm. 18.

fundamentalis menghendaki suatu pemerintahan teokrasi, dimana negara diposisikan seolah-olah merupakan “kepanjangan tangan Tuhan” perwakilan Tuhan di bumi.¹⁴ Hukum yang di gunakan adalah hukum Tuhan.

Namun dalam perkembangannya, politik Islam tidak sedikit dianggap sebagai agama politik moral yang sebagai representasi dan pengijawantahan dari aspek hukum Islam, yang mengatur seorang muslim dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan, sosial dan politik. Aturan itu mengatur hubungan mereka dengan non-muslim, hubungan penguasa dengan rakyatnya, hubungan sosial dan politik, semuanya diperlukan tatanan etika, atau perilaku moral menjadikan hukum-hukum agama sebagai sumber penetapan sanksi moral.¹⁵

Dengan kondisi tersebut, pengembangan etika politik dalam Islam yang mengedepankan etika sebagai filosofis, merupakan agenda yang sangat signifikan untuk di kembangkan. Perkembangan itu, etika dapat kita konsepsikan dalam etika pemimpin yang dipimpin yang melibatkan mulai dari penyusunan kebijakan, desain struktural dalam institusi, organisasi pelayanan, sampai pada manajemen pelayanan, semuanya di peruntukan dalam satu misi yaitu untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan yang baik.

Oleh karena itu, pusat perhatian kita terhenti pada aktor-aktor dan institusi-institusi yang terlibat dalam fase-fase tersebut, apakah aktor-aktor dan institusi yang ada pada waktu itu mereka benar-benar menjalankan tugas berdasarkan kepentingan publik atau tidak. Salah satu yang paling mendasar

¹⁴ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁵ Philip K. Hitti, *History of the Arabs; from the Earlist Time to the Present*, (New York: Palgrave Macmilan, 2002), hlm. 501.

kenapa penulis ingin mencurahkan pikiran untuk menulis “etika politik” dengan alasan penyelenggara negara yang sudah tidak memperdulikan etika, yang memiliki orientasi *universality* dan keadilan bagi seluruh, bukan partikular bagi golongan.

Untuk itu, dalam menjalankan kebijakan publik, seharusnya memiliki nilai-nilai moral yang berlaku dalam otoritas tersebut, nilai tersebut bisa saja disimpulkan kedalam hal yang berlaku secara umum, seperti nilai kebenaran, kebaikan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan atau ada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, etika politik yang seharusnya tumbuh ketika diterapkan pada pelayanan publik yang baik, perbuatan yang melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan. Dengan etika, ada standar dalam penilaian, mungkin mengalami perkembangan, untuk mencapai kedewasaan dan otonomi beretika secara substantif.¹⁶

Dalam pandangan penulis, melihat kondisi sosial politik yang ada pada saat ini sungguh memperlihatkan. Sebagian orang terjebak pada politik keuntungan sendiri, yang berorientasi duniawi dan kering terhadap nilai-nilai ajaran kebenaran. Padahal yang melakukan itu boleh kita katakan orang-orang yang memiliki agama Islam. Begitupula, kerancuan atau kesalahan dalam merumuskan kebijakan publik yang menjadikan tanggung jawab mereka.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, etika dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dimulai dari pemilihan aktor-aktor

¹⁶ Majalah, *Perencanaan Pembangunan*, Edisi, 24. Th. 2001. Oleh Yeremias T. Keban, Ph.D.

politik. Dengan pemilihan bibit yang baik, bisa memprediksikan, apakah kebijakan yang dibuat lahir dari kepentingan bersama atau sebaliknya. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam membangun pemerintah yang baik adalah dengan pemilihan bibit yang memiliki standarisasi. Standar tersebut bisa kita sandingkan seperti Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, dalam aspek pemikiran Ibnu Taimiyah teori tentang etika politik dalam karya (*Al-Siyasah-Syar'iyah fi Ishlahal-Raiwaal-Ra'iyah*) yang menggambarkan pemerintah dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat Al-Qur'an dan Sunnah, dimana pemerintah berusaha untuk membangun masyarakat menurut idaman dan norma Islam. Dalam politiknya, bahwa pemerintah harus menerapkan tuntutan Syari'ah menurut kebutuhan zaman dan tempat masing-masing.¹⁷

An-Na'im berpendapat, Syari'ah memiliki harapan cerah dalam kehidupan masyarakat Islam, karena dapat menyiapkan anak-anak untuk hidup bermasyarakat, membina lembaga dan hubungan sosial. Syari'ah akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika yang dapat direfleksikan dalam undang-undang dan kebijakan politik yang baik melalui proses politik yang demokratis. Menurutnya, berlakunya hukum Syariat secara formal bukan kehendak hukum Islam akan tetapi kehendak politik.¹⁸

¹⁷ Thomas Michel SJ, *Ibnu Taimiyah Alam Pikiran dan Pengaruhnya di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Orientasi, 1983), hlm. 174.

¹⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar Rany, (Yogyakarta: PT. LKIS, 2001), hlm. 15.

Perundang-undangan diwujudkan dalam sebuah negara untuk penegakkan etika politik dalam Islam bukan lantaran kehendak hukum Islam, tetapi kehendak kepentingan bersama dalam negara. Tetapi Islam sudah memiliki rambu-rambu etik serta prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk menjaga kestabilan, upaya dilakukan untuk mengatasi pertentangan itu.

Selain itu Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqqadimah*, sesungguhnya organisasi masyarakat (*Ijtima' insani*) umat manusia adalah keharusan. Para filosof melahirkan kenyataan ini dengan perkataan mereka, manusia adalah bersifat politis menurut tabiatnya. Ini berarti, memerlukan satu organisasi kemasyarakatan, yang menurut para filosof dinamakan kota.¹⁹ Pernyataan Ibnu Khaldun ini membuat sebuah kekuatan sosial yang memiliki kekuatan saling membantu satu sama lain sehingga, tujuan untuk menemukan *the good life* itu bisa tercapai. Selanjutnya Ibnu Khaldun berpendapat, tanpa organisasi itu eksistensi manusia tidak akan sempurna. Keinginan tuhan hendak memakmurkan dunia dengan makhluk manusia, dan menjadikan mereka Khalifah di permukaan bumi ini tentulah tidak terbukti. Inilah arti yang sebenarnya dari peradaban.²⁰

Ketika umat manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan seperti kita sebutkan itu, dan ketika peradaban dunia telah menjadi kenyataan, umat manusia pun memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan memelihara mereka, karena permusuhan dan kezaliman adalah merupakan watak hewani yang dimiliki oleh manusia. Senjata yang

¹⁹ Ahmadie Thoha, *Muqqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm.71.

²⁰ *Ibid*, hlm. 73.

dibuat manusia untuk pertahanan dari serangan binatang tidaklah mencukupi bagi pertahanan terhadap serangan sesama, dan ini tidaklah mungkin datang dari luar. Maka dengan sendirinya yang akan melaksanakan kewibawaan itu haruslah salah seorang diantara mereka sendiri.²¹

Di setiap individu manusia memiliki sifat hewan yang berada didalam nya, dengan demikian mereka manusia harus menjaga kebiwaannya diantara mereka sendiri, Ibnu Khaldun mengakui bahwa terdapat banyak negara yang tidak mendasarkan kebijakan dan peraturan negara atas ajaran dan hukum agama, akan tetapi negara dapat mewujudkan ketertiban, keserasian hubungan antara para warga, bahkan dapat berkembang dan jaya.²²

Kebutuhan akan adanya seseorang yang mempunyai otoritas dan bisa mengendalikan ini kemudian meningkat. Adanya dukungan dan rasa kebersamaan yang terbentuk inilah seorang pemimpin dalam mengatur dan menjadi penengah tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan tentara yang kuat dan loyal.²³

Al'Ashabiyyah secara harfiah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti rasa satu kelompok atau solidaritas sosial.²⁴ *'Ashabiyah* juga mengandung makna group feeling, solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, nasionalisme, atau sentimen sosial, yaitu cinta dan kasih sayang seorang manusia kepada saudara atau tetangganya ketika salah satu darinya diperlukan tidak adil atau disakiti. Untuk bertahan hidup masyarakat harus memiliki

²¹ *Ibid*, hlm.74.

²² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 109-110.

²³ Ahmadie Thoha, *Muqqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm.104.

²⁴ Munawir Sjadzali, *Op. Cit*, hlm. 104.

sentimen kelompok ('*Ashabiyyah*) yang merupakan kekuatan pendorong dalam perjalanan sejarah manusia, pembangkit suatu klan. Klan yang memiliki '*ashabiyyah* kuat dapat berkembang menjadi sebuah negeri.²⁵

Tujuan terakhir solidaritas adalah kedaulatan, karena solidaritas sosial itulah yang mempersatukan tujuan, mempertahankan diri dan mengalahkan musuh. Begitu solidaritas sosial memperoleh kedaulatan atas golongan nya, maka ia akan mencari solidaritas golongan lain yang tak ada hubungan dengan nya. Jika solidaritas sosial dapat menaklukan solidaritas lain, keduanya akan bercampur yang secara bersama-sama menuntun tujuan yang lebih tinggi dari kedaulatan. Akhirnya, apabila suatu negara sudah tua umurnya dan para pembesarnya yang terdiri dari solidaritas sosial yang baru akan merebut kedaulatan negara. Bisa juga ketika negara sudah berumur tua, maka butuh solidaritas lain. Dalam situasi demikian, negara akan memasukan para pengikut solidaritas sosial yang kuat kedalam kedaulatannya dan dijadikan sebagai alat untuk mendukung negara.²⁶

Dalam kehidupan modern, persoalan etika dan moral sering menjadi perbincangan publik. Tinjauan filsafat tentang makna dan definisi filsafat, etika dan moral sangat beragam bagi tiap-tiap pakar. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa penggunaan “etika” dan “moral” selalu menerangkan perbandingan antara nilai yang baik dan buruk, yang berlaku bagi semua semua bidang kehidupan manusia.²⁷

²⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 120.

²⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 166-167.

²⁷ Franz Magniz Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hlm. 363.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan pengkajian yang lebih faktual mengenai pemikiran terhadap bidang politik, terutama dalam bidang etika politik. Maka dengan ini penulis mengambil judul skripsi **“ANALISIS PERBANDINGAN CORAK PEMIKIRAN ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN.”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Corak Etika Politik menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Etika Politik menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui corak Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi khususnya hukum yang berkaitan dengan etika politik, dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan

ilmu hukum pada umumnya dan *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara) khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat membuka cakrawala pemikiran dan menjadi sumbangan pemikiran dalam penegakan kepentingan bersama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan artian menjadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama (primer).²⁸

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menggambarkan secara objektif materi yang diteliti. Analitik dipergunakan untuk mendapatkan dan mengetahui implikasi dari ide etika politik Islam.

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun rincian masing-masing sumber sebagai berikut :

- a) Data primer disandarkan pada literatur klasik *Siyasah Syar'iyah* Ibnu Taimiyah dan *Muqqadimah* Ibnu Khaldun.
- b) Data sekunder merupakan sumber pendukung dari primer yang berasal dari kepustakaan, buku-buku maupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

²⁸ Taufiq Abdullah dan Rusli Karim (ed.), *Metodelogi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Tiara Laksana, 1989), hlm. 2.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*library research*) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data informasi diperoleh berdasarkan bahan-bahan yang ada diperpustakaan, baik berupa arsip, dokumen, majalah, maupun lainnya.²⁹

4. Metode Pengolahan Data

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data, pentingnya pengolahan data diantaranya data yang telah terkumpul perlu diolah dahulu tujuannya menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam susunan yang baik, dan rapi kemudian dianalisis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.³⁰ Komparatif yaitu sebuah metode perbandingan dengan cara menganalisa data-data yang ada, kemudian penulis kombinasikan untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang padu.

²⁹ Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.37.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), hlm.127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Etika Politik Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³¹ Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.³²

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.³³ Sementara menurut Burhanudin Salam, etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.³⁴

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Balai Pustaka, Tahun 2002), hlm.271.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya, 1997), hlm. 13.

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

³⁴ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta: Rineka Cita, 2002), hlm 1.

Etika dilihat dari ruang lingkup dan pengertiannya, etika sangat dekat dengan moral. Kata *moral* dari bahasa latin yaitu *mos* dan bentuk jamaknya *mores* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, dan cara hidup. Oleh karena itu sama halnya dengan etika yang juga dalam bahasa yunani mempunyai pengertian adat istiadat mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan.³⁵

Sementara politik dalam bahasa inggris *politic*, secara leksikal mengandung arti *acting on judging wisely, well judged, prudent*, yaitu bijaksana atau dengan bijaksana. Politik dalam bahasa latin adalah *politicus*, dalam bahasa yunani *politicos*, berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* “kota”. Politik dalam bahasa Indonesia dipahami dengan tiga arti, yaitu (1) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, (2) tipu muslihat atau kelicikan, dan (3) dipakai nama disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.³⁶

Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.³⁷

Dalam kaitannya etika dan politik, filsafat politik dahulu mempersoalkan tentang masalah nilai etika, pertanyaan yang diajukan

³⁵ Franz Magniz Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Etika dan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm 19.

³⁶ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 61.

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 61.

merupakan abstraksi moral yang bersumber dari upaya manusia untuk memaknai kehidupan dengan ajaran yang lebih baik dan pasti.³⁸

Sedangkan menurut Franz Magniz Suseno, etika politik pada dasarnya merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sebagai usaha ilmiah, filsafat dibagi kedalam beberapa cabang. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan apa yang ada dan bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul diwilayah ini adalah apa itu manusia, alam, hakikat realitas, apa itu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praktis manusia adalah etika.³⁹

Sementara menurut Ayi Sofyan, filsafat dan etika politik mengupas argumentasi dan pertanyaan ilmu politik mengenai hakikat realitas pola legitimasi, dan tuntutan normatif dasar yang dikemukakan. Dalam kerangka ini fungsi etika politik ditetapkan. Ada tiga kriteria untuk menilai betul tidaknya tindakan politik itu, yaitu :

1. Pada tingkatan umum, yaitu prinsip-prinsip moral dasar, misalnya prinsip keadilan, kejujuran dan amanah.
2. Bersifat menengah dan mengacu pada bidang tertentu, misalnya prinsip kekuasaan harus di legitimasikan secara demokratis, dan kebijakan publik melalui permusyawaratan dalam perwakilan rakyat.
3. Kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Prinsip pertama masih umum dan bersifat abstrak sehingga tidak dapat di operasionalkan

³⁸ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 76.

³⁹ Franz Magniz Suseno, *Op. Cit*, hlm. 12.

tanpa instrument dan ukuran yang jelas oleh karena itu, ia merupakan wewenang etika umum untuk menilainya.⁴⁰

Lebih lanjut, Franz Magnis Suseno mempunyai pandangan dan orientasi menanamkan nilai-nilai moralitas kepada sesama manusia, sehingga bisa terwujud tatanan hidup berbangsa yang menghormati dan mengangkat derajat seseorang sebagai manusia dan terciptanya persaudaraan. Etika politik memang tidak dapat mengkhotbahi para elite politik, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang mau menilai kualitas tataran dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.⁴¹

Suatu keyakinan yang selalu ada dalam pandangan etika, bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Politik dalam pandangan etika tidak lebih dari suatu alat, sama dengan negara itu sendiri, hanyalah suatu alat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam sebuah negara.⁴²

Muhammad Tahir Azhari, menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Islam dengan sifat yang kompreherensif itu, dijumpai pula aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*. Kecuali itu, pemikiran tentang negara telah pula diletakkan dasar-dasarnya oleh seorang pemikir Islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana Barat yaitu Ibnu Khaldun. Sebagaimana Muhammad Tahir Azhari telah jelaskan, Ibnu Khaldun telah menentukan sesuatu tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan

⁴⁰ Ayi Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 21-22.

⁴¹ Franz Magniz Suseno, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁴² Burhanuddin Salam, *Op. Cit*, hlm. 113.

manusia, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.⁴³

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam *Mulk Siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum yaitu : (1) *Siyasah Niniyah* Muhammad Tahir Azhari terjemahkan sebagai nomokrasi Islam dan (2) *Siyasah Aqliyah* yang Muhammad Tahir Azhari terjemahkan sebagai nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (Syari'ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik Syari'ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, keduanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya dalam Nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Apakah nomokrasi Islam itu ? Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas.
7. Prinsip perdamaian.

⁴³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan masa kini)*, (Jakarta: Preneta Media, 2004), hlm. 84-85.

8. Prinsip kesejahteraan.

B. Prinsip-prinsip dan Dasar Hukum Etika Politik Islam

Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT, karena Allah SWT, adalah sumber dari segala kekuasaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT sebagai pemilik kekuasaan yang dapat limpahkan kepada siapa saja yang di kehendaki-Nya, demikian pula sang Maha Esa mampu merenggut kekuasaan dari siapa saja yang di kehendaki-Nya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sekedar sebuah amanah dari Allah SWT Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu manusia dalam menunaikan amanah itu hendaklah berpegang pada prinsip-prinsip etika politik dalam Islam sebagai berikut:

a. Prinsip Kepemimpinan sebagai Amanah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisa:58).*⁴⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah berarti “tenang dan tidak takut”. Jika kata tersebut dijadikan kata sifat, maka ia mengandung pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman”. Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah SWT.

b. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam. Ayat pertama terdapat dalam surah Asy-Syuura .

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Asy-Syuura: 38).*⁴⁵

Sedangkan surah yang kedua terdapat pada surah Al-Imran.

⁴⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 250.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Surakarta: Al-Karim, 2009), hlm. 487.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهٗمۡ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ؕ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ ؕ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Al-Imran:159).⁴⁶

Ayat pertama menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Ayat kedua menekankan perlunya diadakan musyawarah atau lebih tegasnya umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya.

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan upaya untuk mencari pandangan objektif dalam suatu perkara, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara bulat atau dengan resiko yang relatif kecil.

⁴⁶ Ibid, hlm. 71.

Dalam tradisi Islam, dikenal juga upaya pengambilan keputusan secara bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak, yang disebut dengan *Ijma'*. Dengan kata lain, pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah dalam ajaran Islam berkaitan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh pada kebaikan dan melarang pada keburukan).⁴⁷

c. Prinsip Keadilan

Perkataan keadilan sama hal dengan musyawarah yang bersumber dari Al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan, di antaranya terdapat dalam surah *An-Nisa*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوِّمُوا بَلْقِسْطَ شُحْدَا ءِ اللّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أُولُوا الْوَلَدَيْنِ
وَلَا قَرَبَيْنِ ؕ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa: 135).⁴⁸

Dari ayat tersebut di atas sekurang-kurangnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- i. Orang-orang yang beriman wajib menegakkan keadilan.

⁴⁷ Jubair Sitomorang, *Etika Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 58.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 100.

- ii. Setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- iii. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu.
- iv. Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Keadilan-Nya penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya (rahman dan rahim). Dalam Islam, keadilan adalah kebenaran. Kebenaran adalah merupakan salah satu nama Allah. Allah adalah sumber kebenaran yang di dalam Al-Qur'an disebut Al-Haq. Oleh karena itu, Al-Syaukani, sebagaimana yang dikutip Abd. Muin Salim, menyatakan bahwa keadilan adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan menetapkan hukum dengan pikiran.

Apabila prinsip keadilan dibawa ke fungsi kekuasaan negara, maka ada tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu:

- i. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara yang adil, jujur, dan bijaksana.
- ii. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya.
- iii. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah.

d. Prinsip Persamaan

Islam tidak mengenal perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial, dan atribut keduniaan lainnya.⁴⁹ Prinsip Persamaan dalam Islam dapat dipahami dari Al-Qur'an Surah Al-Hujuurat .

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَبِيرٌ ۝

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujuurat:13).⁵⁰

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang merupakan suatu kriteria bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Inilah yang disebut prinsip persamaan.

e. Prinsip Perdamaian

⁴⁹ Jubair Sitomorang, *Op. Cit*, hlm. 59.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 517.

Islam adalah agama perdamaian. Olehnya itu Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian sebagaimana yang termaktub dalam surah *Al-Baqarah* (2): 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.* (Al-Baqarah: 208).⁵¹

f. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang memerlukannya dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah : zakat, sadaqah, hibah, dan wakaf. Mungkin juga dari pendapatan negara seperti pajak, bea, dan lain-lain. Sehingga masyarakat dapat sejahtera dengan menggunakan prinsip ini sesuai dengan penempatannya.

C. Corak-corak Etika Politik Islam

Pemikiran mengenai etika politik yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim memiliki ciri khas tersendiri disetiap zamannya. Para

⁵¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 32.

pemikir ini menurut Harun Nasution, dapat diklasifikasikan zamannya dalam priode klasik hingga pertengahan (650-1800 M), dan priode kontemporer (+1800 M).⁵²

1. Corak Pemikiran Ilmuwan era Klasik dan Pertengahan

Pemikiran Islam klasik dalam kaitannya dengan manajemen kenegaraan memiliki tiga variasi pendekatan: Sentralisme Khalifah, Institusionalisme, dan Organisme.

Manajemen kenegaraan dengan pendekatan sentralisme Khalifah banyak dikemukakan oleh para filsuf baik dari Al-Farabi, Ibnu Sina maupun Al-Ghazali. Pandangan Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam batas tertentu terasa sangat idealis dimana khalifah harus dipegang oleh seorang filsuf sebagai bentuk pengaruh pemikiran Yunani.⁵³

Sedangkan pendekatan institusional banyak dipelopori oleh Imam Al-Mawardi, pandangan Al-Mawardi tidak bisa dilepaskan dari kedudukan Al-Mawardi sebagai seorang *Wazir* (Penasehat) dalam masa Khalifah al-Qadir dan al-Qasim pada pemerintahan Abbasiyah. Al-Mawardi mendapatkan perintah dari Khalifah bagaimana secara teoritis bisa mempertahankan kelangsungan kekhalifahan Sunni yang sedang dalam kemunduran. Nasihat-nasihat Al-Mawardi ini di kemudian hari oleh Machiavelli dalam "Sang Pangeran" sebagai nasihat kepada raja bagaimana menjalankan pemerintahan yang diambang kemunduran.⁵⁴

⁵² Harun Nasution, *Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 50

⁵³ *Ibid*, hlm. 51.

⁵⁴ *Ibid*.

Pendekatan organisme melandaskan suatu pemikirannya bahwa baik-buruknya pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas yang baik dari kepala negara akan tetapi oleh organ kenegaraan secara luas. Pandangan ini adalah dari Hadits tentang hubungan antar mukmin sebagai saudara dan bangunan yang saling melengkapi yang diintegrasikan dalam bentuk pemerintahan.⁵⁵

Pemikiran politik Islam klasik dan pertengahan setidaknya diwarnai dengan beberapa corak pemikiran yang khas sebagai berikut:

- a. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dari pemikiran-pemikiran Yunani, terutama Plato. Interaksi dengan pemikiran Yunani ini tampak menonjol dalam masa-masa pemerintahan kekhilafahan Abbasiyah.
- b. Pemikiran politik sebagian besar memberikan legitimasi terhadap status quo. Baik dalam formulasi teoritik yang memberikan dukungan sampai hanya memberikan saran-saran.
- c. Pemikiran politik Islam lebih berkecenderungan menampilkan bentuk-bentuk yang idealis dari pada yang lebih operasional.⁵⁶

2. Corak Pemikiran Ilmuwan Islam Kontemporer

Pemikiran Politik Islam kontemporer mulai tampak arusnya ketika dunia Islam dalam kondisi terjajah oleh kekuatan Barat. Selama ini pemikiran politik Islam merespon sebuah persoalan internal bergeser kepada persoalan eksternal. Kondisi keterpurukan dalam dunia Islam menjadikan pengaruh ajaran Islam dalam keseharian menjadi

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ M. Hatta, *Alam Pemikiran Yunani*, (Jakarta: Tintamas 1980), hlm 111

pudar bahkan terancam punah. Hal ini yang mengilhami para tokoh pembaharu Islam seperti Jamaludin al-Afghani untuk mengumandangkan produksi pemikiran guna mensikapi dan menggalang umat Islam dalam menghadapi persoalan tersebut.

Corak yang mendasar dari pemikiran politik Islam kontemporer adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi pemikiran sedikit banyak sebagai respon kekalahan dunia Islam atas Barat dari pada sistem internal masyarakat Islam sendiri.
- b. Formulasi pemikiran sedikit banyak ingin mengembalikan pelaksanaan ajaran Islam secara murni (salafi).
- c. Dalam sifat kenegaraan, terpusatkan pada usaha pembebasan negara.⁵⁷

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi dinamika yang cukup beragam dalam meletakkan landasan dasar formulasi pemikiran. Setidaknya formulasi pemikiran terpilah dalam dua kelompok besar; pertama, Kalangan-kalangan yang ingin meletakkan usaha pemurnian ajaran Islam (Purifikasi) sebagai jalan satu-satunya usaha menghadapi Barat. Kecenderungan kalangan ini bersikap selektif bahkan sampai menolak pemikiran Barat, dalam kerangka pembangunan masyarakat. Pemikiran ini sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari pemikiran Imam Hambali dan Ibnu Taimiyah dimasa klasik. Gerakan purifikasi ini tampak

⁵⁷ Harun Nasution *Op. Cit.*, hlm. 53

dipahami sebagai sarana mengembalikan suatu kejayaan Islam yang pernah menggemakan dimasa sebelumnya.⁵⁸

Sedangkan kalangan yang kedua, yakni kalangan yang sebelumnya melakukan kritik terhadap pemahaman Islam yang cenderung konservatif. Kalangan ini menjadi tercerahkan atau dalam penilaian kelompok purifikasi telah terbaratkan. Setidaknya pandangan ini berawal dari sikap akomodatif kepada Barat, dimana tercermin dengan sikap untuk membangkitkan Islam yang setidaknya meniru model Barat dan membangun peradaban Renaissance. Hal inilah yang kemudian mengilhami konsep sekulerisasi pemikiran politik Islam yang selama ini dipahami telah digunakan secara sepihak oleh penguasa demi kelangsungan status quo.⁵⁹

D. Pendapat Berbagai Tokoh tentang Etika Politik Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, para filsuf ataupun fuqaha tidak melepaskan agama dan negara, terutama masalah etika dan moralitas bernegara yang telah dibangun oleh para filsuf muslim. Gagasan negara moral juga amat kental, misalnya dalam pemikiran Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali. Untuk mengetahui secara detail pokok-pokok pemikiran mereka, berikut ini diuraikan beberapa tokoh muslim tersebut :

1. Al-Farabi

Al-Farabi sangat akrab dengan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk ilmu

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

pengetahuan, sering berkontemplasi, menyendiri dan merenung, sehingga jiwanya terpanggil untuk mencapai pola kehidupan bernegara yang ideal.⁶⁰

Teori politik Al-Farabi tidak terpengaruh oleh sistem politik yang berlaku pada saat itu, tetapi merupakan gagasannya yang objektif berdasarkan filsafat nubuwat (kenabian). Al-Farabi sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibn Abi Rabi', berpandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan dan kerja sama dengan orang lain. Tujuan bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi untuk memenuhi kebahagiaan materiil dan spiritual, di dunia dan akhirat.⁶¹

Menurut Al-Farabi, politik ada dua macam. Pertama, pemerintahan yang menegakkan tindakan-tindakan sadar, cara hidup, disposisi positif yang dengan cara demikian, kebahagiaan dapat tercapai. Hal ini terwujud dalam pemerintahan utama, yang kota-kota dan bangsanya tunduk pada pemerintah. Kedua, pemerintah yang tidak menegakkan kebahagiaan adalah pemerintahan *Jahiliyah*.⁶²

Dalam menjelaskan negara utama, Al-Farabi menggambarkan fungsi negara bagaikan anggota-anggota badan, yang apabila salah satu menderita, bagian yang lain ikut merasakan. Seperti halnya tiap-tiap anggota mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda, demikian pula

⁶⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI- Press, 1993), hlm.50.

⁶¹ Ayi Sofyan, *Op. Cit*, hlm.258.

⁶² Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 78.

kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan anggota sebagai manifestasi interaksi sosial.⁶³

Kedudukan kepala negara sama dengan jantung dalam tubuh yang merupakan sumber koordinasi. Pekerjaan kepala negara tidak hanya bersifat politis, tetapi meliputi etika sebagai *way of life*.

Kriteria kepala negara harus memenuhi kualitas: (1) lengkap badannya, (2) baik inteligensinya, (3) baik mutu intelektualitasnya, (4) pandai mengemukakan pendapat, dan mudah di mengerti, (5) pecinta pendidikan, dan gemar mengajar, (6) tidak tamak, (7) pecinta kejujuran, (8) berakhlak mulia, (9) tidak mengutamakan keduniaan, (10) bersifat adil, (11) optimis dan percaya diri, (12) kuat pendirian, penuh keberanian, dan antusias, dan tidak berjiwa kerdil. Apabila tidak ada seseorang yang memenuhi criteria seperti itu, negara dapat diperintah dengan presidium.⁶⁴

Kepala negara harus menjauhi dan membersihkan jiwanya dari sifat-sifat hewani, seperti korupsi, manipulasi, tirani yang merupakan aktualisasi pemerintahan *Jahiliah*, pemerintahan fasik, pemerintahan apatis, dan pemerintahan yang sesat.⁶⁵

Al-Farabi banyak mengemukakan teori serta konsep dalam bidang falsafah, antara lain, mengenai akhlak dan kepemimpinan. Falsafah

⁶³ Ayi Sofyan, hlm. 259-260.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhammad Azhar, *Op. Cit*, hlm.. 80.

menurutnya ialah ilmu yang memiliki hakikat yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada.⁶⁶

Salah satu falsafah Al-Farabi ialah akhlak dan kepemimpinan. Akhlak adalah tabiat, perangai, dan tingkah laku. Akhlak merupakan inti dari Islam. Pendapat Al-Farabi tentang Islam merujuk pada teori akhlak Yunani, yaitu kebahagiaan adalah kebaikan tertinggi bagi kehidupan manusia.⁶⁷

Falsafah lainnya adalah konsep keadilan yang tercantum di dalam kitab *Al-Madinah Al-Fadhilah*. Adil merupakan akhlak dan sikap yang harus ada dalam pemimpin. Al-Farabi mengatakan bahwa ada dua jenis keadilan, yaitu keadilan pada Allah dan keadilan sosial.⁶⁸

Al-Farabi juga senantiasa memusatkan perhatiannya pada persoalan pemimpin negara, yang dianggapnya sebagai penyebab dan penggerak keutuhan dalam sebuah negara. Selain itu, seseorang pemimpin dituntut pula mempunyai sikap kepemimpinan. Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar dan memikul tugas yang berat untuk mengatur negara dengan aman.⁶⁹

Dari teori Al-Farabi jelaslah bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan individu ataupun masyarakat, akhlak mempunyai

⁶⁶ Ayi Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 261.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*, hlm.262.

hubungan yang penting dalam proses kepemimpinan. Akhlak tidak dapat dipisahkan dari soal kepemimpinan.⁷⁰

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori akhlak dan kepemimpinan yang dikemukakan Al-Farabi tampaknya amat ideal dan tidak menyimpang dari ajaran dan dasar-dasar Islam. Pendekatan yang digunakan adalah akal serta menjadikan agama sebagai landasan falsafahnya.⁷¹

2. Al-Mawardi

Al-Mawardi dalam karyanya yang monumental dalam bidang Siyasa adalah *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, dan *Adab Al Al Dunya wa Ad Din*. Pemikiran Al-Mawardi termuat prinsip-prinsip politik kontemporer dan kekuasaan, yang pada masanya dapat dikatakan, sebagai pemikiran maju, bahkan sampai kini. Misalnya, dalam buku Al-Mawardi dibahas masalah pengangkatan *Imamah* (kepala negara/pemimpin), pengangkatan menteri, gubernur, panglima perang, jihad bagi kemaslahatan umum, jabatan hakim, jabatan wali pidana. Selain itu, juga dibahas masalah imam shalat, zakat, fa'I, dan ghanimah (harta peninggalan dan rampasan perang), ketentuan pemberian tanah, ketentuan daerah-daerah yang berbeda status, hukum seputar tindak kriminal, fasilitas umum, penentuan pajak jizyah, masalah protektorat, masalah dokumen negara, dan sebagainya.⁷²

Baginya, imam (yang dalam pemikirannya adalah seorang raja, presiden, sultan) yang merupakan suatu keharusan. Artinya,

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.* hlm. 264.

keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Tanpa imam akan terjadi kekacauan. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga.⁷³

Al-Mawardi memerinci tanggung jawab dan kekuasaan jabatan Khalifah serta hubungannya dengan administrasi yang sebenarnya. Ia berargumentasi pada contoh-contoh yang pernah terjadi pada zamannya dengan pendapat tokoh-tokoh hukum yang terdahulu.⁷⁴

Al-Mawardi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang paling memerlukan bantuan orang lain dibanding makhluk lainnya. Perbedaan inteligensia, intelektual, kepribadian dan bakat, mendorong manusia untuk bekerja sama. Dari kerja sama ini mereka sepakat untuk mendirikan negara. negara merupakan kebutuhan manusia untuk mencukupi kebutuhan bersama, dan saling membantu dan menjalin ikatan.⁷⁵

Menurut Al-Mawardi, ada enam sandi dasar untuk menegakkan negara, yaitu (1) agama yang ditaati, sebagai pengendali hawa nafsu dan kontrol atas hati nurani, (2) penguasa yang berwibawa, yang mampu mempersatukan aspirasi yang berbeda sehingga dapat mengantarkan negara mencapai tujuannya, (3) keadilan yang merata, keadilan terhadap atasan, bawahan, dan terhadap mereka yang setingkat, (4) stabilitas keamanan masyarakat yang terkendali, (5) kesuburan tanah (lahan) yang

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Muhammad Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi*, dalam M.M. Shanf (ed), *Para Filosof Muslim*, hlm.719.

⁷⁵ Ayi Sofyan, *Op. Cit*, hlm.267.

berkesinambungan, sehingga tidak muncul motivasi menjadi agresor, (6) cita-cita besar, untuk menumbuhkan harapan kelangsungan hidup. Melalui sendi dasar etik demikian, diharapkan negara benar-benar mengupayakan persatuan dan kesatuan dan saling menolong diantara mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga.⁷⁶

Al-Mawardi berpendapat bahwa yang berwenang mengangkat kepala negara adalah *ahlul hilli wal aqdi*. Mereka harus memiliki syarat-syarat : (1) adil dengan segala syarat-syaratnya, (2) ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal, (3) wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, dan yang paling efektif, paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

Adapun untuk jabatan kepala negara (Khalifah), kriterianya adalah : (1) adil dengan syarat-syarat yang universal, (2) ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum, (3) sehat indriawi (telinga, mata, dan mulut), mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya, (4) sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat, (5) wawasan yang membuatnya mampu mengelola semua kepentingan, (6) berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan mampu

⁷⁶ Muhammad Azhar, *Op. Cit*, hlm. 83.

melawan musuh, (7) nasab dari Quraisy berdasarkan nash Hadits dan *Ijma'*.⁷⁷

3. Al-Ghazali

Al-Ghazali dalam karyanya *Al Iqtishad wa Al I'tiqad*, ia mengemukakan teori kepemimpinan sekaligus mengungkapkan teori gabungan negara moral atau teori *Siyasatul Akhlak* dengan mengemukakan, “Kewajiban mengangkat seorang kepala negara bukanlah berdasarkan rasio, melainkan berdasarkan Syariat agama. Faktor keamanan jiwa dan harta tidak akan tercapai tanpa penguasa yang ditaati. Oleh karena itu, agama dan penguasa merupakan dua saudara kembar. Agama adalah fondamen, sementara negara adalah pelindungnya”.⁷⁸

Atas dasar teori kepemimpinan dan gabungan negara moral itu, Al-Ghazali mengemukakan, “tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Tidak ada sekularisasi ajaran agama yang dipandang hanya mengurus persoalan individu, sehingga harus dipisahkan dari urusan politik kenegaraan, dan kemasyarakatan dalam arti luas. Sekularisme beranggapan bahwa kehidupan materi adalah segala-galanya, satu-satunya tolak ukur kebahagiaan. Kemakmuran materiil tidak lagi dianggap sebagai alat, tetapi diubah menjadi tujuan, mereka menolak kehidupan akhirat. Al-Ghazali justru menunjukkan sebaliknya bahwa agama dan negara adalah saudara kembar. Dengan demikian, agama bukan hanya mengatur kehidupan individual, melainkan juga kehidupan kolektif, agama

⁷⁷ Ayi Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 269.

⁷⁸ *Ibid*, 273.

menyentuh kehidupan seluruhnya, mencakup ritual, etika, hubungan antar anggota, keluarga, masalah sosial ekonomi, administrasi pemerintahan, hak dan kewajiban, warga negara, sistem peradilan, hukum perang dan damai, hukum internasional dan seterusnya, ini berarti antara agama dan negara terjalin erat untuk berdirinya kedaulatan negara melalui kepala negara yang ditaati yang mampu menjembatani kepentingan rakyat.⁷⁹

Menurut Al-Ghazali, Allah telah memilih dua kelompok dari bani Adam : (1) para nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah tentang jalan yang benar akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, (2) para raja (kepala negara) dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Allah tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak, dan memandu mereka kearah kedudukan yang terhormat. Oleh karena itu, Sultan adalah bayangan Allah dimuka bumi maka wajib di cintai dan harus ditaati serta tidak dibenarkan menantang.⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Azhar, *Op. Cit*, hlm. 90.

⁸⁰ Ayi Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 274.

BAB III

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN SERTA CORAK PEMIKIRAN ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN

A. Ibnu Taimiyah dan Corak Pemikiran Etika Politiknya

1. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah, nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas Ahmad Taqiyuddin Ibnu as-Syaikh Syihabuddin Abi al-Mahasin Abdul al-Halim Ibnu as-Syaikh Majdi ad-Din Abi al-Barakat Abdu as-Salam Ibnu Abi Muhammad Abdillah Abi al-Qosim al-Khadhri.⁸¹ Ia lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 H./ 22 Januari 1263 M. di Harran, daerah Palestina dekat Damaskus, dari keluarga ulama Syria yang setia dengan ajaran puritan dan amat terikat dengan mazhab Hambali.⁸² Kakeknya adalah Abdu as-Salam adalah seorang ulama pemuka agama tersohor di Bagdad. Tradisi ini turun-temurun sampai Abdul al-Halim ayahnya Ibnu Taimiyah yang menjabat kepala sekolah terkemuka di Damaskus.⁸³

Julukan Ibnu Taimiyah adalah Abul Abbas, namanya adalah Ahmad dan gelarnya adalah Taqiyuddin. Lengkapnya adalah Abul Abbas Ahmad Taqiyuddin. Sedangkan sebab munculnya laqab “Ibnu Taimiyah” menurut suatu riwayat, kakek Syikhul Islam, Muhammad bin Khadir pergi

⁸¹ M. Hasan al-Jamal, *Hayatu al-A, Immatun*, terj. M. Khaled Muslih, Imam Awaluddin, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm 203.

⁸² Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic of Story of Government According to Ibnu Taimiyah*, terj. Masroni, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm.20.

⁸³ Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syikhul Islam Ibnu Taimiyah*, terj. Qadirunnur, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 47.

menunaikan haji dan dia memiliki seorang istri yang tengah hamil (yang ditinggalkannya) melewati daerah Taima'. Disana kakeknya melihat seorang anak perempuan masih kecil keluar dari tempat persembunyiannya (karena sedang bermain). Ketika sang kakek kembali ke Harran, dia mendapatkan istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan (yang kemudian akan menjadi ibunya Ibnu Taimiyah), maka ketika ia melihatnya (ia teringat anak perempuan di daerah Taima' mengatakan, "Ya Taimiyah, ya Taimiyah", sehingga kemudian Syikhul Islam digelar dengan Ibnu Taimiyah (anak Taimiyah).⁸⁴

Ibnu Taimiyah berasal dari Harran. Ibnu Jubair berkata, "cukup bagi kampung ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan, bahwa kampung inilah tempat bapak kita Nabi Ibrahim As." Cuaca di Harran sangat berpengaruh pada sikap Ibnu Taimiyah, yakni menjadikan seorang yang berperilaku bersih, bagus tingkah laku dan *istiqamah*, di samping cuaca panasnya mampu mengobarkan semangat bela agama.⁸⁵

Sekitar tahun 667 H/ 1268 M. keluarganya (Ibnu Taimiyah) bermigrasi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman bangsa Mongol atau tentara Tartar. Beliau (Ibnu Taimiyah) datang bersama orang tuanya dan keluarganya ke Damaskus ketika beliau masih sangat kecil. Mereka eksodus dan melarikan diri dari kota Harran demi menghindari kezhaliman dan kesewenang-wenangan bangsa tartar kala itu. Mereka berjalan di

⁸⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmua'h al-Fatawa*, terj. Izzudin Karimi, *Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah tentang Khilafah Islamiyah, Memerangi Pemberontakan, Hukum Murtad, Pengadilan Negeri, Sumpah dan Nadzar, Makanan Halal dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Sahifah, 2008), hlm. 18.

⁸⁵ Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharu Salafi dan Dakwah Reformasi*, terj. Faisal Saleh, Khoerul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 17.

malam hari, dengan membawa kitab-kitab yang mereka angkut dengan gerobak yang ditarik sapi ternak karena tidak ada hewan tunggangan, sehingga hampir saja mereka berhasil disusul oleh musuh. Karena beratnya muatan gerobak tersebut mogok, maka mereka bermunajat kepada Allah untuk memohon pertolongan kepada-Nya, hingga mereka pun terhindar dari musuh dan selamat, dan disanalah untuk pertama kalinya Syikhul Islam kecil menghadiri majelis ilmu guru beliau yang pertama, Asy-Syekh Zainuddin Ahmad bin ad-Da'im al-Maqdisi.⁸⁶

Ketika pindah ke Damaskus tersebut, Ibnu Taimiyah baru berusia 6 tahun. Orang tuanya mempunyai pandangan jauh kedepan dan mengerti pentingnya pendidikan. Oleh sebab itu ia diasuh dan di didik dengan baik. Dengan pendidikan yang begitu terarah, sehingga dalam usia yang relatif muda sudah hafal Al-Qur'an. Di samping potensi kecerdasannya, lingkungan keluarga, ia sangat mencintai ilmu dan giat mencarinya pada siapa, dimana dan kapan saja. Tiada hari baginya tanpa membaca, mendengar dan berdiskusi.

Di Damaskus Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan studinya, di bawa bimbingan sang ayah. Studi yang ditekuninya didasarkan paradigma dan kaidah-kaidah mazhab Imam Hambali. Ia juga banyak belajar kepada syekh-syekh yang lain, oleh sebab itu tidak mengherankan jika kemudian

⁸⁶ Ibnu Taimiyah, terj. Izzudin Karimi, *Op. Cit*, hlm. 19.

ia sangat menguasai berbagai disiplin ilmu seperti, Al-Qur'an, Hadits, Tafsir, Fiqh, Ushul Fiqh, bahasa, berhitung, logika dan filsafat.⁸⁷

Ilmu Tafsir adalah disiplin ilmu yang paling disukai oleh Ibnu Taimiyah. Minatnya terhadap ilmu yang satu ini kelihatannya sangat begitu tinggi, hal ini dapat dipahami dari pernyataannya bahwa dia telah mempelajari lebih dari seratus kitab tafsir Al-Qur'an.⁸⁸ Agaknya minat dan kecerdasannya dalam lapangan ilmu tafsir inilah yang membuat ia begitu independent dalam pemahamannya dalam berbagai persoalan keagamaan, disamping penguasaan ilmu lainnya.

Disebutkan bahwa, pendidikan Ibnu Taimiyah dimulai dengan mengaji kepada ayah dan pamannya. Ia juga belajar kepada beberapa ulama terkemuka terutama di Damaskus dan sekitarnya. Jumlah ulama dan guru besar Ibnu Taimiyah mencapai lebih dari dua ratus syekh.⁸⁹ Di antara sekian banyak guru yang telah mentransformasi ilmunya dapat disebutkan antara lain :

1. Syam ad-Din Abd Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad al-Maqdisi (597-682 H.) adalah seorang ahli hukum Islam (Fiqih) dan Hakim Agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Syria, setelah Sultan Baybars (1260-1277 M) melakukan pembaharuan di bidang peradilan.

⁸⁷ Persoalan filsafat banyak dibicarakannya, ketika melancarkan kritik terhadap kesesatan dan kekeliruan dalam alur logika, terutama filsafat Yunani. Masalah tersebut banyak dimuatnya dalam sebuah kitab; *Naqd al-Mantiq*, lihat Nurcholis Majid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 39-40.

⁸⁸ Abul Hasan Ali an-Nadawi, terj. Qadirunnur, *Op. Cit*, hlm. 45.

⁸⁹ Ibnu Taimiyah, *Qa'idah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, terj. Misbahul Munir, dkk. *Ibadah Tanpa Perantara Kaidah-kaidah dalam Tawassul*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006) cet I, hlm. 16.

2. Al-Munaja Ibnu Utsman al-Tanukhi (611-695 H.). Ia seorang guru Ibnu Taimiyah di bidang Fiqih, tokoh tersohor bidang fiqih pada zamannya di Syam (Suriah). Ia juga seorang Mufasssir dan ahli nahwu, pemberi fatwa dan pengarang. Karangannya antara lain; Syarh al-Mughni sebanyak empat jilid, Tafsir Al-Qur'an, ikhtisar al-Mashul, dan lain sebagainya.
3. Ibnu Abd al-Qawiyy (603-699 H.) adalah seorang ahli Hadits, Fiqh, nahwu dan pengarang, karyanya antara lain; Kitab al-Furuq.
4. Ibnu Abd al-Da'im (557-678 H.) seorang guru Ibnu Taimiyah di bidang Hadist. Di antara ulama yang meriwayatkan hadist darinya adalah al Syaikh al-Muhy al-Din al-Nawawi dan Ibnu Daqiq al-id. Ibnu Taimiyah belajar dengannya Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab Shahih Enam (Kutub al-Sittah).⁹⁰

Melihat jumlah dan kualitas guru-guru Ibnu Taimiyah, di samping keberadaan sosok Ibnu Taimiyah sendiri, maka dapat dimengerti mengapa ia menjadi seorang yang berilmu luas, kritis dan berpandang orisinil. Dan pada gilirannya ia mampu melahirkan murid-murid yang memiliki kualitas ilmu keagamaan yang handal antara lain: al-Hafiz Ibnu Qoyyim, al-Hafiz Ibnu Katsir, al Hafiz Ibnu Abdil Hadi, al-Hafiz Ibnu Rajab⁹¹ dan lain-lain.

Apabila menyebut tafsir, maka dialah pembawa panjinya, apabila menghitung nama-nama fuqaha', maka dialah seorang mujtahid mutlak pada zamannya. Jika menghadiri majelis *huffaz* (hafalan), Ibnu Taimiyah

⁹⁰ Abul Hasan Ali an-Nadawi *Op. Cit*, terj. Qadirunnur.

⁹¹ Said Abdul Azhim *Op. Cit*, terj. Faisal Saleh, Khoerul Amru Harahap, hlm.18.

berbicara dengan lantang, semua hadirin diam, ia menghafal tidak seorangpun mampu mengikutinya, bahkan ketika hafalannya yang lain masih banyak, yang lain sudah kehabisan hafalan. Ketika menyebut ahli ilmu kalam, dialah orangnya dan kepadanya orang-orang merujuk.⁹² Demikianlah beberapa komentar tentang ketokohan Ibnu Taimiyah dalam sejarahnya.

Kehebatan Ibnu Taimiyah, tidak hanya diakui dari kalangan yang mengaguminya, sebutlah kelompok yang setuju dengan pemikirannya, tetapi lebih dari itu, ternyata lawan polemiknyapun memberi komentar yang sama. Kamal al-Din Ibnu al-Zamlakani, seorang penganut mazhab Syafi'i, sengaja menulis beberapa jilid buku untuk menentang pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah. Dalam sebuah tulisannya tetap mengakui kehebatan Ibnu Taimiyah, ia berkomentar; jika dia (Ibnu Taimiyah) berbicara tentang sesuatu ilmu, dia selalu lebih dari pada yang dibutuhkan, dalam hal tulis-menulis dia begitu indah memilih kata-kata, paparannya tepat pada sasaran, pandai menyusun kerangka dan kata-kata.⁹³

Ibnu Taimiyah adalah penentang keras terhadap setiap bentuk khurafat dan bid'ah atau inovasi terhadap agama. Dengan sikapnya yang demikian itu dia dimusuhi oleh banyak kelompok Islam, dan kerap kali berlawanan pendapat dengan kebanyakan ulama ahli hukum. Dia sering

⁹² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm 7.

⁹³ Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah Hidup dan Pikiran-pikirannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm.21-22.

pula menentang arus, karenanya berkali-kali masuk penjara, bahkan akhirnya meninggal di dalam penjara.

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral. Masyarakat, khususnya tempat Ibnu Taimiyah lahir, dan umumnya di seluruh wilayah kekuasaan Mamalik, atau bahkan di banyak kawasan lain, sangat heterogen, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat sering terjadi perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah banyak macam bangsa; Arab asal Irak, Arab asal Suriah, Mesir, Turki, Tartar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia, dan sebagainya, sedang mereka semua berbeda satu sama lain dalam adat istiadat, tradisi, perilaku, dan alam pikiran. Hal itu jelas menimbulkan kerawanan-kerawanan kehidupan bernegara. Dalam suasana demikian sukar diciptakan stabilitas politik, keserasian sosial dan pemupukan moral serta akhlak, yang lebih parah lagi, pada waktu itu masalahnya tidak hanya banyak agama yang berbeda satu sama lain, tetapi juga banyak mazhab, termasuk juga mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.⁹⁴

Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqaidah 728 H atau 26 September 1328 M dalam penjara di bentang Qal'ah.

2. Karya-karya Ibnu Taimiyah

⁹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Islam*, (Jakarta: UI-Press, 2003), hlm.80-81.

Karya-karya imam ini bnyak sekali, yang mana para murid dan pencintanya tidak mamou untuk menghitungnya, salah satu muridnya Ibnu Qoyim berkata : “Amma ba’da, Sesungguhnya sekelompok pencinta dan ilmu meminta kepadaku agar aku menyebutkan karya-karya Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, maka saya katakan kepada mereka bahwa saya tidak mampu menyebutkan secara pasti jumlahnya karena beberapa hal yang saya sebutkan kepada sebagian mereka dan akan saya sebutkan Insha Allah seperti ini.” Kemudian beliau berkata :

1. Di antara yang saya lihat dalam bidang tafsir, kemudian dia menyebutkan 92 karya tulis yang berupa risalah maupun kaidah.
2. Di antara yang di karang dalam bidang ushul baik ia karang sejak awal ataupun karena menjawab penanya atau orang yang memberi *I’tiradh* (bantahan), kemudian ia menyebutkan 20 karya tulis baik yang berupa kitab, risalah maupun kaidah.
3. Dalam bidang *Qawaid* dan fatwa disebutkan 145 karya yang meliputi buku, risalah dan kaidah.
4. Kitab-kitab Fiqih 55 karya, yang mencakup risalah dan kaidah.
5. *Washaya* (wasiat), Ijazah, dan risalah-risalah yang mengandung beberapa ilmu mencapai 22 karya.⁹⁵

Az-Zirkli mengutip dari al-Hafizh Ibnu Hajar yang menyebutkan dalam ad-Durr al-Kaminah, bahwa hasil karya tulis Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mencapai lebih dari 4000 buku manuskrip. Dalam Fawat al-

⁹⁵ Ibnu Taimiyah, terj. Misbahul Munir, dkk, *Op. Cit*, hlm. 17-18

Wafayat disebutkan bahwa karya tulis beliau mencapai 300 jilid. Bahkan al-Fasi mengutip perkataan al-Hafizh adz-Dzahabi yang menyatakan bahwa jumlah karya tulis Syikhul Islam mencapai 500 jiid.⁹⁶

Di antara sekian banyak buku-buku tersebut, sampai sekarang masih banyak tersebar. Inilah contoh-contoh di antara karangan monumental Ibnu Taimiyah :

1. *Majmu' al-Fatwa* (Kumpulan fatwanya tentang Aqidah, Fiqih, Tafsir, Hadits, Ushul Fiqih, dan lain sebagainya).
2. *Muwafaqah Shahih al-Manqul li Sharih al-Ma'qul* (tentang kedudukan nash Al-Qur'an dan as-Sunnah, kaitan dengan akal-logika).
3. *Al-Jawab al-Shahih Lima Baddal Din al-Masih* (Tentang bentahan terhadap keyakinan orang Nasrani).
4. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi al-Raad 'ala al-Syi'ah wa al-Qadariyah* (tentang bentahan terhadap Syi'ah dan Qadariyah) sebanyak 4 jilid.
5. *Al-Qawa'id al-Nuranniyah al-Fiqhiyah* (Tentang kaidah-kaidah Fiqih).
6. *Kitab Al-Iman* (tentang Iman dan Aqidah).
7. *Kitab Naqd al-Mantiq* (tentang gugatan terhadap ilmu logika).
8. *Iqtida al-Shirath al-Mustaqim* (tentang Bid'ah dan Sunnah).
9. *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir* (pengantar ilmu Tafsir Al-Qur'an)
10. *Al-Ubudiyyah* (tentang konsepsi integralitas ibadah)

⁹⁶ Ibnu Taimiyah, terj. Izzudin Karimi, hlm. 33.

11. *Ishlah al-Ra'I Warra'iyah* (tentang tatanan bernegara dan bermasyarakat dalam Islam).
12. *Ra'ulmalam 'an A 'immah al-a' 'lam* (tentang hakikat dan sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama).
13. *Al-Kalimah al-Thaiyyibah* (tentang Doa dan Zikir Rasulullah).
14. *Hijab al-Ma'rifah wa Limasuha fi al-Shalah* (tentang kewajiban berkerudung dan busana wanita ketika shalat)
15. *Al-Qa-'idah al-Jalilah fi Tassawul wa al-Wasilah* (tentang hukum dan kaidah bertasawul dalam berdoa).
16. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah li Arra'I wa Ar-Raiyyah*.⁹⁷

3. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Etika Politik

a. Kewajiban Mendirikan Negara

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah kewajiban mendirikan sebuah negara atau kekuasaan, bukan berdasarkan Ijma', sebagaimana pendapat kebanyakan para pemikir Sunni. Ia lebih lanjut menekankan bahwa keberadaan suatu negara merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan Syariat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya harus memerlukan seseorang pemimpin. Dalam keterangannya yang lain, di sebutkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umat di

⁹⁷ Kitab-kitab tersebut dilacak penulis dari beberapa buku-buku yang menjelaskan ketokohan Ibnu Taimiyah.

dunia dan di akhirat serta untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan mungkar diperlukan seorang pemimpin serta rakyat harus mematuhiya.⁹⁸ Pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat, Ia didasarkan kepada Hadits dan karakteristik ajaran Islam. Hadits dimaksud antara lain, sabda Rasulullah SAW:

“Apabila ada tiga orang melakukan perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka”, dan sabdanya yang lain “Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tengah padang pasir, kecuali mereka mengangkat seorang dari mereka untuk jadi pemimpin mereka”. Sedangkan karakteristik ajaran Islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang teraniaya, dan melaksanakan hukuman (hudud). Semuanya tidak biasa dilaksanakan kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karena itu, di awal pembahasannya mengenai masalah ini, Ia menegaskan bahwa mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak jika tidak ada pemimpin dan kekuasaan.⁹⁹ Pemikiran ini jelas merupakan realisasi dari dasar aspek *dhururiyat* dan tujuan syariat Islam yaitu menciptakan kemashalatan.

⁹⁸ Ibnu Taimiyah. *Majmu' a-Rasail al-Kubra*, (Kairo: Maktabah al-Misriyyah), Jilid I, hlm. 36.

⁹⁹ Ibnu Taimiyah terj. Rofi' Munawwar, *Op. Cit*, hlm. 227.

Dengan demikian menegakkan pemerintahan bagi Ibnu Tamiyah karena ajaran agama, dibentuknya pemerintahan itu dimaksudkan untuk mengabdikan kepada Allah.¹⁰⁰ Pengabdian dan pimpinan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan pendekatan diri kepada Allah. Jadi pemerintahan merupakan alat mengabdikan kepada Allah bukan alat untuk mencari kedudukan dan materi. Jika yang tersebut terakhir terjadi maka akan rusak binasalah segala urusan. Dalam kaitan pentingnya pemerintahan, ia mengutip pendapat yang mengatakan: “enam puluh tahun di bawah pemerintahan seorang kepala negara yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang kepala negara”.¹⁰¹

Dari uraian diatas, terlihat dengan jelas bahwa formulasi kemashalatan bersama hanya dengan keberadaan suatu negara yang dikelola secara baik. Hal ini merupakan landasan maslahat, karena menciptakan kemashalatan atau kemanfaatan serta menghindarkan kerusakan adalah asas maslahat yang utama.

b. Landasan Amanah dan Keadilan dalam Praktik Penyelenggaraan Negara

Didalam menyelenggarakan atau menjalankan roda pemerintahan sebuah negara, tentu sangat banyak permasalahan yang timbul, terutama permasalahan antara sesama warga negara. Tugas dari seorang pemimpin sebuah negara tentu adalah sebagai mediator

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 229.

¹⁰¹ *Ibid*. hlm. 228.

terhadap pemecahan masalah tersebut. Ibnu Tamiyah menjelaskan bahwa menyelesaikan perkara yang timbul di antara orang banyak, wajib diselesaikan menurut hukum dengan cara yang adil, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Problem-problem yang sering timbul diantara orang banyak antara lain: masalah pembagian harta warisan; masalah muamalat seperti jual beli, wasiat, pengiriman dan pemasukan barang (ekspor-impor), serikat kerja, perburuhan, hibah, waqaf, dan sebagainya. Semua harus diselesaikan dengan adil. Karena urusan dunia dan akhirat tidak bisa terwujud jika tidak suatu menegakkan keadilan. Keadilan yang bersifat lahiriyah yang dapat dipahami oleh banyak orang, misalnya, wajib menentukan harga yang pantas bagi pembeli, haram berlaku curang dalam takaran dan timbangan, wajib bersifat benar dan terus terang, haram berdusta, khianat, dan menipu. Sedangkan keadilan yang bersifat bathin menjadi prinsip pokok bagi setiap peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh semua orang Islam. Pada umumnya perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya di bidang muamalat dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah perbuatan aniaya serta manipulasi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Selain menyampaikan amanah dan penegakan keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin negara harus membudayakan musyawarah. Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada Rasul-Nya. Perintah musyawarah kepada Nabi untuk mengikat hati para

sahabatnya, dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang kemudian. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW senantiasa membudayakan musyawarah di kalangan sahabatnya. Suka bermusyawarah merupakan cerminan salah satu sifat orang yang beriman dan di puji Allah. Jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar menghendaki agar mengikuti petunjuk kitab dan Sunnah atau Ijma' kaum muslimin, maka menurut Ibnu Tamiyah wajiblah mengikuti kehendak itu. Tidak seorang pun boleh menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam lapangan agama atau politik. Pemimpin (*ulil amri*) dalam surat An-Nisa ayat 59 menurut pendapat Ibnu Tamiyah terdiri dari para pemimpin negara (*umara*) dan ulama.¹⁰² Karena itu, jika ingin masyarakat itu baik, maka kelompok kedua itu harus terdiri dari orang-orang yang terbaik. Dalam mewujudkan cita-cita positif tersebut kedua golongan itu (*umara* dan ulama) wajib menjalin kerja sama yang baik, yang berpedoman kepada petunjuk Al-Qur'an dan Hadits.

Segala persoalan yang timbul wajib mengambil dasar patokan kepadanya. Bila tidak mungkin, karena sukar mencari dalil-dalil, atau dalil yang ada sama kuatnya serta sulit untuk dipegangi atau sebab-sebab lain, maka orang boleh saja turut kepada orang yang dipercaya kualitas ilmu dan agamanya, di sinilah peranan *Ijtihad* dibudayakan. Karena itu, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh pemikir Islam yang

¹⁰² *Ibid*, hlm 223.

gencar memarakan *Ijtihad* dalam rangka pemurnian agama dari pemikiran-pemikiran dan pengalaman agama yang sesat, seperti terlihat dalam landasan amanah dan keadilan penempatan pejabat berdasarkan kecakapan dan kualitas, hubungan pejabat dan ulama, serta asas musyawarah dan kebijakan politik yang mengacu kepada kepentingan bersama. Artinya, bahwa negara itu berperan dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda secara sempurna.

c. Islam dan Bentuk Negara

Ibnu Taimiyah sedikitpun tidak menyinggung bentuk konstitusi negara Islam. Ia hanya menampilkan bahasan mengenai urgensi kekuasaan dalam menegakkan Syariat dan kewajiban umat untuk mematuhi. Jadi Syariat dihargai karena kandungan dan isinya. Tidak adanya rujukan bagi suatu bentuk pemerintahan tidak dianggap sebagai sebuah ketidaksempurnaan, tetapi justru sebagai akibat kebijaksanaan Allah agar tidak mengikat.

Ibnu Taimiyah menyerang Sunni dan Syi'ah menurut pandangannya, bahwa tidak ada dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang teori Imamah.¹⁰³ Ia melihat Islam sebagai suatu tatanan sosial yang mempunyai hukum tertinggi, yaitu hukum Allah. Oleh sebab itu, ia sama

¹⁰³ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 278.

sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya meskipun menerima negara itu sebagai suatu kebutuhan agama. Artinya, negara Islam yang memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan pada Syariat sebagai penguasa tertinggi.

Kehadiran Ibnu Taimiyah dengan pandangannya tentang Syariat sebagai sumber kekuasaan final dan standar mutlak bagi segala ragam kekuasaan dan kekuatan menghindarkan sebuah gerakan Islam dari pengaruh teokrasi. Dalam sistem itu, posisi ulama tidak bisa disamakan dengan kedudukan para pendeta karena kekuasaan mereka tidak berasal ordinasi pemerintah, tetapi berakar pada pengetahuan mereka tentang Syariat, suatu kenyataan yang memungkinkan setiap muslim berpengetahuan memiliki kedudukan sebagai alim (orang yang berpengetahuan agama)¹⁰⁴

d. Pengangkatan Kepala Negara

Ibnu Taimiyah tidak secara khusus membahas bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, akan tetapi memperhatikan beberapa buah pikiran-pikirannya di atas dapat terbaca bagaimana ia merumuskan hal ini. Memang pemikir kenegaraan muslim dari golongan Sunni umumnya sangat berbeda dengan pola Syi'ah dengan sistem *Imamah*.

Menurut Ibnu Taimiyah, doktrin Syi'ah tentang adanya nash penetapan kepala negara adalah bohong besar. Ia juga mengkritik doktrin tokoh Syi'ah tersebut, bahwa imam diangkat oleh Allah seperti Ali

¹⁰⁴Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 67.

diangkat oleh Allah menjadi Imam dan telah dibuktikan secara *Ijma'*.¹⁰⁵

Demikian pula dia tidak menerima doktrin Sunni bahwa kepala negara diangkat dengan cara pemilihan. Sejak masa permulaan katanya, tidak terdapat pemilihan pemimpin secara murni dikalangan umat Islam yang ada dukungan dan persetujuan umat Islam. Artinya, pengangkatan Khalifah empat (*al-Khulafaur Rasyidin*) sebagai acuan doktrin para pendahulunya, tidak atas dasar murni, mereka mendapat persetujuan umat yang ditandai dengan adanya mubaya'at.¹⁰⁶ Mubay'at yakni sumpah kesetiaan antara dua pihak: kepala negara (imam) dan masyarakat dan untuk mengadakan kerja sama. Dukungan dan persetujuan umat itu adalah cerminan dari keinginan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dengan kritiknya itu, mestinya Ibnu Taimiyah mengajukan pemikiran alternatif lain dalam pengangkatan kepala negara. Tetapi dalam hal ini tidak menyinggungnya. Justru ia bicarakan penunjukan dan pengangkatan kepala negara oleh pemimpin yang mendapatkan kepercayaan mengelola kepentingan umat Islam. Dalam hal ini dia mengutip sabda Rasulullah SAW dan pendapat Umar Ibnu Khattab. Menurut Rasulullah SAW, bila pemimpin mempercayakan urusan umat kepada seseorang padahal ada orang yang lebih baik dan mampu mengurus hal itu, maka pemimpin itu mengkhianati Allah, Rasul-nya dan umat Islam. Sedangkan Umar mengatakan seorang pemimpin mempercayakan suatu urusan umat kepada seseorang berdasarkan yang

¹⁰⁵ Jeje Abd Rojak, *Politik Kenegaraan*, di kutip dari. Kitab *Manhaj as- Sunnah Ibnu Taimiyah*. jilid I, hlm. 38.

¹⁰⁶ Ayi Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 285.

aktual (kecakapan dan kemampuan), maka pemimpin itu telah mengkhianati Allah, Rasulullah, dan umat Islam.¹⁰⁷

Karena itu, Ibnu Taimiyah menegaskan adalah kewajiban seorang pemimpin dalam menempatkan para pejabat negara lebih dulu meneliti siapa-siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin yang akan menjadi wakil-wakil seluruh daerah sebagai wakil pemegang kekuasaan (kepala negara) dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Seperti para hakim, para pemimpin militer, para pejabat keuangan yang terdiri dari menteri-menteri dari sekretaris negara, para petugas pemungut pajak dan zakat, pejabat-pejabat daerah, kepala pasar, kepala desa, imam sembahyang, muadzin, guru, petugas haji dan sebagainya harus berdasarkan kecakapan dan kemampuan untuk menduduki jabatan itu. Bukan karna hubungan keluarga atau sahabat, berasal dari satu daerah, pengikut satu aliran (mazhab), satu suku bangsa, suku menjilat, atau karna imbalan uang, dan pemusuhan terhadap yang lebih berhak dan lebih mampu. Bukan pula karena menuntut jabatan itu Rasulullah SAW pernah bersabda: *Bahwa kami tidak akan pernah menyerahkan jabatan kepemimpinan ini kepada orang yang menuntutnya*". (H. R. Bukhari dan Muslim)¹⁰⁸

e. Syarat-syarat Kepala Negara

Sekalipun Ibnu Taimiyah tidak merumuskan secara konkrit sistem pengangkatan kepala negara, tapi Ia sangat memperhatikan klasifikasi calon kepala negara atau pejabat pemerintah. Ia berpendapat orang yang

¹⁰⁷ Jeje Abd Rojak, *Op. Cit*, hlm. 168.

¹⁰⁸ *Ibid.*

pantas menjabat kepala pemerintahan adalah yang memiliki kualifikasi kekuatan (*al-Quwwah*) dan integritas (*al-Amanah*), yaitu orang yang paling baik bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya (*al-Qawiy al-Amin*).¹⁰⁹

Ibnu Taimiyah mengakui bahwa kekuatan dan amanah sekaligus dalam diri seseorang memang sulit dijumpai. Karena itu, untuk menempatkan orang dalam tiap-tiap jabatan pimpinan, harus sesuai antara kemampuan dan kedudukan itu. Apabila ditemui dua orang, satu diantaranya lebih besar integritas dan yang lain lebih menonjol kekuatannya, maka yang lebih diutamakan adalah mana yang lebih bermanfaat bagi bidang jabatan itu dan lebih sedikit resikonya.¹¹⁰

Ibnu Taimiyah tidak mengisyaratkan bagi calon kepala negara dari golongan Quraisy, bagaimana pemikir Sunni, alasannya adalah hal ini masih diperselisihkan, maka ini tidak mungkin diterapkan. Sejalan dengan persyaratan kepala negara diatas, harus benar-benar berkualitas dan mempunyai tanggung jawab amanah, karena ia dituntut agar melaksanakan tujuan utama syariat Islam, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta tegaknya keadilan dan aman dalam bermasyarakat.¹¹¹

B. Ibnu Khaldun dan Corak Pemikiran Etika Politiknya

1. Biografi Ibnu Khaldun

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 169.

¹¹⁰ Jeje Abdur Rozak, *Op. Cit*, hlm 139.

¹¹¹ Jeje Abdur Rozak, *Op. Cit*, hlm 140.

Ibnu Khaldun hidup antara abad ke 14 dan 15 M (1332-1406 M) bertepatan abad ke 8 dan 9 H. Mesir pada waktu itu berada dibawah kekuasaan Bani Mamluk Kota Baghdad yang jatuh ke tangan bangsa Tartar (654-923 H). Dampaknya sangat negatif bagi perkembangan bahasa, sastra dan kebudayaan Arab. Disaat yang bersamaan, berbagai kerajaan muslim di Andalusia mulai runtuh. Satu persatu kota-kota kerajaan Islam jatuh ke tangan kaum Kristen.¹¹²

Pasca kejatuhan Baghdad, Ulama dan sastrawan Baghdad bersama para Ulama Andalusia mengungsi ke Kairo, Mesir yang menjadi pusat peradaban. Kedatangan mereka di kota Kairo di sambut baik oleh Bani Mamluk, sehingga mereka merasa tenang dan tentram. Pada abad ke 8 H atau abad ke 14 M merupakan masa perubahan dan transisi di seluruh dunia. Perubahan dan transisi ke arah perpecahan dan kemunduran di dunia Arab, sekaligus perubahan dan transisi ke arah kebangkitan di dunia Barat. Dapat kita lihat, berbagai revolusi dan kekacauan mulai meluas di Afrika Utara, sebagai dampak dari perpecahan-perpecahan regional dan meluasnya fanatisme golongan. Kondisi itu berdampak negatif bagi kebudayaan Arab pada waktu itu. Demikianlah gambaran sosial politik di masa Ibnu Khaldun.¹¹³

Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu ‘Abd Al-Rahman Ibnu Khalid. Namun ia lebih dikenal dengan nama Ibnu

¹¹² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm 1079-1080.

¹¹³ *Ibid.*

Khaldun. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Magribi Al-Hadrami Al-Maliki. Di golongan kepada Al-Magribi, karena ia lahir dan dibesarkan di Magrib di kota Tunis, dijuluki Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut Yaman, dan dikatakan Al-Maliki karena ia menganut madzhab Imam Malik. Gelar Abu Zaid diperoleh dari nama anaknya yang tertua Zaid. Panggilan Wali Ad-Din diperolehnya setelah ia menjadi hakim di Mesir.¹¹⁴

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/1332 M di tengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat yang berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Dari lingkungan inilah Ibnu Khaldun memperoleh dua orientasi yang kuat: pertama, cinta belajar dan ilmu pengetahuan; kedua, cinta jabatan dan pangkat.¹¹⁵

Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad juga berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dari bidang politik dan menekuni ilmu kesufian. Beliau ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Beliau meninggal dunia pada tahun 749 H/ 1348 M.¹¹⁶

Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian baru menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Ibnu Khaldun lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga ilmuwan yang terhormat. Ayahnya Abu Abdullah Muhammad adalah gurunya yang pertama. Darinya ia belajar membaca, menulis dan bahasa

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 1080.

¹¹⁵ *Ibid*.

¹¹⁶ *Ibid*.

Arab. Di antara guru-guru yang lain adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad bin Burral Al-Ansari, darinya ia belajar Al-Qur'an dan Al-Qira'at Al-Hasayiri, Muhammad Al-Syawwasy Al-Zarzali, Ahmad Ibnu Al-Qassar dari mereka Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. Di samping nama-nama di atas Ibnu Khaldun menyebut sejumlah Ulama, seperti Syaikh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadiyasyi, darinya ia belajar ilmu-ilmu Hadist, bahasa Arab, Fiqih. Pada Abdullah Muhammad Ibnu Abdussalam ia mempelajari kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Malik.¹¹⁷

Diantara guru-gurunya yang terkenal dan ikut serta membentuk kepribadian Ibnu Khaldun, Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Satti' 'Abd Al-Muhaimin Al-Hadrami, Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili. Darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika, dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran di samping dua ilmu pokok (Al-Qur'an dan Hadits).¹¹⁸

Namun demikian, Ibnu Khaldun meletakkan dua orang dari sejumlah guru-gurunya pada tempat istimewa, keduanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan bahasa, filsafat, dan hukum Islam, yaitu Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili dalam ilmu-ilmu filsafat dan Syaikh 'Abd Al-Muhaimin Ibnu Al-Hadrami dalam ilmu-ilmu agama. Darinya Ibnu Khaldun mempelajari kitab-kitab Hadist, seperti *Al-Kutub Al-Sittah* dan *Al-Muwatta'*. Pada usia 20 tahun, Ibnu Khaldun berhasil

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 1081.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 1082.

menamatkan pelajarannya dan memperoleh berbagai ijazah menagajar dari sebagian besar gurunya setelah ia menimba ilmu dari mereka.¹¹⁹

Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Qur'an sejak usia dini. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ahli politik Islam, dan bapak ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah di kemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana.¹²⁰

Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang sangat luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengambaraannya yang sangat luas pula.¹²¹

Selain itu, dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik di Fez, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh Dinasti Fathimiyyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum di berbagai penjuru dunia.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 1086.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 1087.

Ibnu Khaldun, wafat di Kairo, Mesir, pada 25 Ramadhan 808 H/ 19 Maret 1406 M.¹²²

2. Karya-karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar adalah karena karyanya “*Muqaddimah*”. Rasanya memang aneh ia terkenal justru karena *muqaddimah*nya bukan karena karyanya yang pokok (*Al-‘Ibar*), namun pengantar *Al-‘Ibar*nyalah yang telah membuat namanya diagung-agungkan dalam sejarah intelektualisme. Karya monumentalnya itu telah membuat para sarjana baik di Barat maupun di Timur begitu mengaguminya sampai-sampai Windellband dalam filsafat sejarahnya menyebutkan sebagai “Tokoh ajaib yang sama sekali tidak lepas, baik dari masa lampau maupun masa yang akan datang”.¹²³

Sebenarnya Ibnu Khaldun sudah memulai karirnya dalam bidang tulis menulis semenjak masa mudanya, tatkala ia masih menuntut ilmu pengetahuan, dan kemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Adapun hasil karyanya yang terkenal di antaranya:

1. Kitab *Muqaddimah*, yang merupakan buku pertama dari kitab *Al-‘Ibar*, yang terdiri dari bagian *Muqaddimah* (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi harum.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, hlm. 1085.

Adapun tema *Muqaddimah* ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya.¹²⁴

2. Kitab *Al-'Ibar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi As-Sulthani Al-'Akbar*. (Kitab Pelajaran dan Arsip Permulaan dan Zaman Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab *'Ibar*, yang terdiri dari tiga buku: Buku pertama, adalah sebagai kitab *Muqaddimah*, atau jihad pertama yang berisi tentang : Masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syria, Persia, Yahudi, (Israel), Yunani, Romawi, Turki, dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian buku ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam, dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara).

¹²⁴ *Ibid.*

3. Kitab *Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* atau disebut secara ringkas dengan istilah *At-Ta'rif*, dan oleh orang-orang Barat disebut dengan otobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab *Al-'Ibar* yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain.¹²⁵

3. Pendapat Ibnu Khaldun tentang Etika Politik

Pemikiran politik yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun secara garis besar terbagi atas negara (baik dari segi pendiriannya, maupun bentuk pemerintahannya), serta pemikiran mengenai pemimpin atau kepala negara, namun hal terpenting dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik bukanlah terletak pada bentuk negara, tetapi bagaimana negara dapat berjalan secara adil dan jujur dalam moral-etik agama yang menjamin pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Terlepas dari apapun bentuknya, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep negara yang dipahami oleh Ibnu Khaldun ialah konsep negara yang Islami dan berjalan sesuai dengan ajaran semangat Islam dalam setiap hukum yang diterapkan¹²⁶

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 1086.

¹²⁶ Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata Kehidupan bernegara Era Modern*, (Jambi: Sultan Thaha Press, 2007), hlm. 153.

Berikut pemikiran politik yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun:

a. Konsep 'Ashabiyyah

Kata '*ashabiyyah* telah digunakan bangsa Arab jauh sebelum kedatangan Islam. Namun pengertian '*ashabiyyah* tersebut berkonotasi negatif, yakni fanatisme kekabilahan atau kesukuan yang sempit, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.¹²⁷ Sehingga '*ashabiyyah* pada waktu itu dianggap sebagai penghancur superioritas umat Islam periode awal, karena telah memunculkan berbagai dinasti dalam Islam. Namun dalam kata pengantar buku *Muqaddimah* terjemahan Masturi Ilham Lc, dijelaskan bahwa istilah '*ashabiyyah* berasal dari kata '*ashaba* (keluarga). Istilah tersebut pada mulanya mengandung makna membantu dan memperkuat keluarga.¹²⁸ Kemudian istilah tersebut berkaitan erat pula dengan istilah '*ishabah* dan '*ushbah*, yang keduanya sama-sama berarti kelompok. '*Ashabiyyah* yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun ini tidak terbatas pada hubungan keluarga semata, namun bisa bermakna luas dalam bentuk hubungan-hubungan yang dibangun oleh seorang pemimpin secara efisien dengan para pendukung dan masyarakatnya. Hubungan antara pemimpin dengan masyarakatnya akan memunculkan proses saling membutuhkan. Jika terjadi perpaduan secara besar-besaran, maka akan menghasilkan kelompok superioritas yang besar pula dalam suatu negara.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 180.

¹²⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm 51.

'Ashabiyyah merupakan sebuah konsep besar yang mewarnai segenap pemikiran politik Ibnu Khaldun. Dalam pembukaan keterangannya tentang dinasti, kerajaan, Khilafah, pangkat pemerintahan dan segala yang berhubungan dengan kekuasaan, ia menyatakan bahwa kemenangan selalu berada di pihak yang memiliki *'ashabiyyah* (solidaritas) lebih kuat. Oleh sebab itu, seorang penguasa memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan kuat berupa loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap otoritas dan kekuasaannya. Dari berbagai *'ashabiyyah* atau solidaritas kelompok yang terdapat di negara itu, seorang kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan.¹²⁹

Ibnu Khaldun memahami *'ashabiyyah* sebagai ikatan yang memiliki kekuatan mengikat dalam komunitas masyarakat. Ikatan tersebut membuat satu kelompok *'ashabiyyah* memiliki rasa senasib sepenanggungan. Bila salah satu anggota merasa tersakiti, maka seluruh masyarakat yang ada dalam satu *'ashabiyyah* tersebut juga akan ikut merasakan tersakiti.¹³⁰ Sehingga pada umumnya, *'ashabiyyah* merupakan ikatan emosional yang mengikat dan menyatukan hubungan antar manusia, sehingga memiliki solidaritas sosial yang tinggi terhadap sesamanya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan misalnya, *'ashabiyyah* dapat memperkuat kerjasama antara

¹²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 105.

¹³⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, *Op. Cit*, hlm 192.

satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kebutuhan apapun yang diinginkan akan segera terpenuhi akibat dari kerjasama dan rasa solidaritas tersebut. Karena di dalam 'ashabiyyah, tiap individu diarahkan untuk memiliki visi yang sama untuk mencapai tujuannya dan merasakan kesatuan dari rasa solidaritas yang amat erat.

b. Sistem dan Bentuk Negara

Mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat merupakan kewajiban agama yang paling agung. Tegaknya nilai-nilai agama seperti keadilan, keamanan, keteraturan, dan keadaban hanya mungkin dilakukan melalui negara atau pemerintahan.¹³¹ Menurut Ibnu Khaldun, bentuk pemerintahan itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kerajaan, yaitu pemerintahan yang membawa umatnya kepada tujuan dan keinginan yang tersusun dalam satu individu. Pemerintahan ini menyerupai apa yang dikenal dengan pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi atau inkonstitusional.
- b) Republik, yaitu pemerintahan yang membawa berbagai manfaat bagi masyarakatnya dalam mencapai kemaslahatan duniawi karena menjalankan kebijaksanaannya berdasarkan rasio oleh para pemikir dan intelektual.
- c) Khilafah, yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya untuk berpikir sesuai dengan jalan agama dalam memenuhi semua kepentingan mereka. Inilah yang dipahami sebagai pemerintahan yang Islami oleh Ibnu Khaldun. Jika aturan undang-undangnya diputuskan oleh para intelektual, maka kebijaksanaan politiknya disebut rasional. Dan jika aturan-aturan itu berasal dari syariat agama, maka orientasi politiknya adalah religius, bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹³²

¹³¹Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 13.

¹³²Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 83.

Konsepsi negara yang Islami tersebut menurut Ibnu Khaldun adalah negara yang tidak hanya terpaku untuk melaksanakan Syariat agama ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akhirat semata, tetapi negara yang memperhatikan masalah dunia dan akhirat secara seimbang. Sehingga pemerintahannya pun benar-benar mencerminkan tujuan Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Pemimpin dan Kedudukannya

Proses interaksi sosial antar manusia mengakibatkan kehidupan sosial yang lebih besar, sehingga memerlukan seseorang yang mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakatnya yang memiliki konflik atau permasalahan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa:

“*Ashabiyyah* merupakan modal utama untuk melindungi dan mempertahankan diri, mengajukan tuntutan terhadap lawan, dan segala sesuatu yang diperlukan. Setiap komunitas sosial kemasyarakatan, manusia secara natural membutuhkan pengontrol dan penengah yang mampu menyelesaikan konflik antara golongan lain dalam setiap komunitas masyarakatnya. Karena itu, pengontrol atau penengah ini harus mampu menguasai mereka dengan ‘*ashabiyyah*’ yang mereka miliki. Jika tidak demikian, maka ia tidak akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik”.¹³³

Seseorang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut,

¹³³Ibnu Khaldun, *Op. Cit.*, hlm. 218.

harus berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat lainnya, harus mempunyai wewenang, kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi di atas masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, konflik dan segala permasalahan di antara masyarakat bisa teratasi dengan baik dan benar. Adapun yang dimaksud dengan seseorang yang mampu untuk bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah seorang kepala negara atau pemimpin.

Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, dan pemikirannya untuk mampu menciptakan suatu keadaan yang nyaman dan sejahtera bagi yang dipimpinnya, serta mampu mengkoordinasi setiap anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pemimpin sangat berpotensi dalam menjaga keharmonisan dan mampu menertibkan masyarakatnya. Seorang pemimpin harus memiliki superioritas atau keunggulan dan kekuasaan untuk berkehendak, serta kebijaksanaan untuk memutuskan suatu perkara sehingga keputusannya merupakan kata akhir yang harus dilaksanakan. Namun, terkadang seorang pemimpin itu memerintah secara tidak adil, lebih mementingkan keinginannya sendiri, dan tidak mementingkan rakyatnya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin harus didasarkan kepada peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam politik yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa:

“Seseorang yang memiliki *‘ashabiyyah* yang kuat dan dihiasi dengan karakter yang terpuji, serta sesuai untuk melaksanakan hukum-hukum agama, maka ia telah siap untuk memegang tanggung jawab sebagai pemimpin dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas mulia tersebut.”¹³⁴

Menurut ajaran agama, seorang pemimpin itu harus pula mengemban tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh agama untuk menegakkan *amar ma’ruf nahi munkar* melalui dukungan kekuatan dan kekuasaan dari negara atau pemerintah. Tujuan dari berdirinya suatu negara adalah melaksanakan sistem sosial yang baik, menegakkan keadilan, mencegah segala macam bentuk kemunkaran atau penyimpangan terhadap norma agama dan umum, serta senantiasa menganjurkan kepada umat manusia untuk melaksanakan kebajikan sebagai realisasi dari perintah agama. Maka dari itu seorang pemimpin juga berkendudukan sebagai wakil Allah didunia dalam hal *amar ma’ruf nahi munkar*. Dalam membahas kedudukan seorang pemimpin, Ibnu Khaldun menyatakan:

“Kekuasaan dari suatu kekhalifahan cenderung memerintah masyarakat berdasarkan ajaran agama, baik dalam kepentingan- kepentingan akhirat maupun kepentingan-kepentingan dunia. Kekhalifahan ini pada hakikatnya merupakan pengganti atau wakil Allah dalam menjaga agama dan kehidupan dunia.”¹³⁵

¹³⁴ Ibnu Khaldun, *Op. Cit*, hlm 228.

¹³⁵ Ibnu Khaldun, *Op. Cit*, hlm. 337.

BAB IV

ANALISIS

C. Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun sebagai dua pemikir Islam yang pemikirannya tetap digunakan sebagai rujukan mengenai konsep politik baik pada zamannya maupun pada zaman-zaman sesudahnya. Keduanya memiliki sifat pemikiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai etika politik bersifat lebih terbuka untuk urusan duniawi, namun tetap tegas dalam urusan agama dan akhirat. Keterbukaan Ibnu Taimiyah terhadap urusan dunia terlihat dari pemikirannya yang tidak terlalu detail dalam menyinggung masalah bentuk negara, tidak menyebut dengan detail mengenai cara pengangkatan pemimpin, serta asal dari pemimpin tidak perlu dari kaum Quraisy. Keterbukaan Ibnu Taimiyah mengenai urusan dunia ini tetap diiringi dengan penekanan terhadap urusan agama. Ibnu Taimiyah menekankan disetiap pernyataannya mengenai etika politik bahwa tujuan pasti dari setiap pernyataannya tersebut adalah tegaknya syariat Islam.

Ibnu Khaldun sebagai seorang ilmuwan muslim yang pemikirannya memiliki corak yang berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Khaldun bercorak lebih detail baik dari pemikiran mengenai urusan duniawi maupun urusan akhirat. Detail pemikiran Ibnu Khaldun mengenai urusan duniawi terlihat dari pembahasannya yang terperinci mengenai bentuk negara, serta sampai menekankan bahwa kedudukan pemimpin adalah sebagai wakil Allah dimuka bumi. Sebagai pemikir yang berbasic Islam, terperinciya pemikiran

Ibnu Khaldun mengenai urusan duniawi yang terkait dengan etika politik tersebut tetap diikuti dengan terperincinya pemikiran yang membahas tentang urusan akhirat. Pernyataan Ibnu Khaldun yang menunjukkan pemikiran rinci mengenai dunia dan akhirat adalah pernyataan yang menekankan mengenai seimbangannya urusan dunia dan akhirat.

D. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun

Sebagai sesama ilmuwan muslim, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentu memiliki pemikiran yang sama dalam membahas sebuah permasalahan. Persamaan pemikiran ini disebabkan karena tujuan utama diantara keduanya yang sama-sama untuk menegakkan syariat Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun mengenai etika politik yang memiliki persamaan adalah:

1. Pemikiran mengenai posisi seorang pemimpin. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun sepakat bahwa seorang pemimpin menempati posisi sebagai pemecah permasalahan warga negaranya. Ibnu Taimiyah menggunakan bahasa pemimpin sebagai mediator permasalahan warga negaranya, sedangkan Ibnu Khaldun menggunakan bahasa pemimpin sebagai penengah pemisah sekaligus hakim dalam permasalahan warga negaranya. Meskipun menggunakan bahasa yang berbeda, namun keduanya memiliki pengertian bahwa pemimpin berposisi sebagai pemecah masalah yang dihadapi warga negaranya.
2. Kewajiban mendirikan negara. Baik Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Khaldun sepakat bahwa mendirikan negara adalah sebuah keniscayaan. Artinya

pendirian sebuah negara merupakan sebuah keharusan. Hal ini disebabkan karena mewujudkan ajaran agama dalam sebuah masyarakat hanya dapat dilakukan jika telah mendirikan sebuah negara.

3. Konsep keadilan dalam penyelenggaraan negara. Dua orang pemikir Islam yang sangat terkenal ini sepakat bahwa keadilan adalah sebuah tujuan dalam penyelenggaraan negara. Ibnu Taimiyah menyatakan hal ini dengan pernyataannya yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan negara bertujuan untuk menegakkan keadilan sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan hal ini dengan bahasa yang terpenting dalam etika politik adalah bagaimana negara dapat berjalan secara adil dan jujur. Hal ini memperlihatkan bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki suatu kesamaan pemikiran mengenai konsep keadilan dalam penyelenggaraan negara.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun adalah dua orang pemikir Islam yang pemikirannya memiliki fokus terhadap politik Islam, fokus pemikiran yang mereka bangun semata-mata untuk mendorong tegaknya syariat Islam. Terlihat dari setiap pernyataan mereka mengenai politik yang selalu berlandaskan pada syariat Islam. Sebagai dua orang yang hidup dalam zaman yang berbeda dan dengan guru yang berbeda, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki perbedaan mengenai etika politik. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan mengenai pemikiran tentang seorang pemimpin, Ibnu Taimiyah memfokuskan pemikirannya terhadap kemampuan seorang

pemimpin. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa pemimpin haruslah orang terbaik diantara yang dipimpin. Ibnu Taimiyah menyatakan hal ini karena berlandaskan pada Hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa bila pemimpin mempercayakan urusan umat kepada seseorang padahal ada orang yang lebih baik dan mampu mengurus hal itu, maka pemimpin itu mengkhianati Allah, Rasul-nya dan umat Islam. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dalam membahas mengenai seorang pemimpin lebih menekankan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki dukungan dari warga negaranya, dan untuk mendapatkan dukungan itu, maka seorang pemimpin harus memiliki '*ashabiyyah*' atau solidaritas sosial dari warga negaranya.

2. Perbedaan pemikiran mengenai konsep bentuk negara. Dalam hal bentuk sebuah negara, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki perbedaan pemikiran. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bentuk negara tidak diatur dalam Islam, yang terpenting menurut Ibnu Taimiyah apapun bentuk sebuah negara adalah baik asalkan menjalankan syariat Islam. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bentuk negara adalah kerajaan, republik, dan Khilafah. Mengenai bentuk negara yang Islami, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa bentuk negara dapat menjadi Islami asalkan penyelenggaraannya seimbang antara kebijakan urusan dunia dan kebijakan urusan akhirat.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Corak pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah adalah bersifat lebih terbuka untuk urusan duniawi namun tetap tegas dalam urusan agama dan akhirat. Keterbukaan Ibnu Taimiyah terhadap urusan dunia terlihat dari pemikirannya yang tidak terlalu detail dalam menyinggung masalah bentuk negara, tidak menyebut dengan detail mengenai cara pengangkatan pemimpin, serta asal dari pemimpin tidak perlu dari kaum Quraisy. Keterbukaan Ibnu Taimiyah mengenai urusan dunia ini tetap diiringi dengan penekanan terhadap urusan agama. Ibnu Taimiyah menekankan disetiap pernyataannya mengenai etika politik bahwa tujuan pasti dari setiap pernyataannya tersebut adalah tegaknya syariat Islam. Sedangkan corak pemikiran etika politik Ibnu Khaldun adalah bercorak lebih detail baik dari pemikiran mengenai urusan duniawi maupun akhirat. Detail pemikiran Ibnu Khaldun mengenai urusan duniawi terlihat dari pembahasannya yang terperinci mengenai bentuk negara, serta sampai menekankan bahwa kedudukan pemimpin adalah sebagai wakil Allah dimuka bumi. Ibnu Khaldun mengenai urusan duniawi

yang terkait dengan etika politik tersebut tetap menekankan mengenai seimbangannya urusan dunia dan akhirat.

2. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun sebagai dua orang ilmuwan muslim yang memiliki persamaan pemikiran tentang etika politik Islam sepakat bahwa:

- a. Pemimpin menempati posisi sebagai pemecah permasalahan warga negaranya.
- b. Mendirikan negara adalah sebuah keharusan.
- c. Keadilan adalah sebuah tujuan dalam penyelenggaraan negara.

Selain memiliki persamaan, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan mengenai pemikiran tentang seorang pemimpin, Ibnu Taimiyah memfokuskan pemikirannya terhadap kemampuan seorang pemimpin, sedangkan Ibnu Khaldun dalam membahas mengenai seorang pemimpin lebih menekankan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki dukungan dari warga negaranya, dan untuk mendapatkan dukungan itu, maka seorang pemimpin harus memiliki '*ashabiyyah* atau solidaritas sosial dari warga negaranya.
- b. Perbedaan pemikiran mengenai konsep bentuk negara. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bentuk negara tidak diatur dalam

Islam, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bentuk negara adalah kerajaan, republik, dan Khilafah.

D. Saran

Para pelaku politik harus memperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam konteks etika berpolitik Islam.

Pertama, bagi para kaum akademis mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti, dan para birokrat, anggaplah hasil dari penelitian ini merupakan wacana yang dapat meramaikan perbincangan metodologis dalam studi Islam, yang terkait lagi etika berpolitik. Mudah-mudahan percikannya yang sedikit setidaknya dapat menambah terangnya kajian *Siyasah* yang terus akan melaju bersama dengan perubahan umat Islam di masa mendatang.

Kedua, dari hasil penelitian ini, setidaknya juga memiliki kelayakkan untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan mengkaji objek penelitian yang sama dengan penelitian ini, dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, kajian tentang etika politik Islam akan semakin menemukan bentuknya.

Ketiga, bagi mereka yang telah terlibat dalam kancah permainan politik praktis, maka setidaknya pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun ini dapat dijadikan sebagai referensi etis dalam berperilaku maupun membangun sebuah sistem nilai Islam, guna mencapai sebuah masyarakat dan negara yang adil dan terbuka.

Terakhir, penulis mengakui bahwa penelitian yang dilakukan ini sangat kurang sempurna. Namun dari kekurang sempurnaan tersebut, justru diharapkan akan dapat ditemukan arus yang berbeda oleh peneliti lain yang akan mengkaji pemikiran tentang etika politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar Rany, Yogyakarta: PT. LKIS, 2001.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Citra Aditya, 1997.
- Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syikhul Islam Ibnu Taimiyah*, terj. Qadirunnur, Solo, Pustaka Mantiq, 1995.
- Ahmadie Thoha, *Muqqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986.
- Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, Surabaya, Bina Ilmu, 1982.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002.
- Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta: Rineka Cita, 2002.
- Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I, Jakarta, UI Press, 1993.
- Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata Kehidupan bernegara Era Modern*, Jambi, Sultan Thaha Press, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Surakarta, Al-Karim, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 2002.
- Franz Magniz Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 2003.
- Franz Magniz Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Etika dan Moral*, Yogyakarta: Kanesus, 1997.

Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, cet VII, Jakarta Gramedia Pustaka Umum, 2003.

Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010.

Harun Nasution, *Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta, UI Press, 1974.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Ilham, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Ibnu Taimiyah, *Qa'idah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, terj. Misbahul Munir, Lc, dkk. *Ibadah Tanpa Perantara Kaidah-kaidah dalam Tawassul, Cet I*, Jakarta Pustaka as-Sunnah, 2006.

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, Lc, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

Ibnu Taimiyah, *Majmu' a-Rasail al-Kubra* Kairo, Maktabah al-Misriyyah, Jilid I.

Ibnu Taimiyah, *Majmua'h al-Fatawa*, terj. Izzudin Karimi, Lc., *Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah tentang Khilafah Islamiyah, Memerangi Pemberontakan, Hukum Murtad, Pengadilan Negeri, Sumpah dan Nadzar, Makanan Halal dan Haram*, Jakarta, Pustaka Sahifah, 2008.

Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1996.

Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum; Esai-Esai Ilmiah untuk Pembaruan* Yogyakarta, Madyan press, 2002.

Jeje Abd Rojak, *Politik Kengaraan*. di kutip dari. *Kitab Manhaj as- Sunnah Ibnu Taimiyah*. jilid I.

Jubair Sitomorang, *Etika Politik*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016.

Khalid Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* Terj. Gita Ayu Rahmani da Ruslani Jakarta, Ufuk, 2004.

Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic of Story of Government According to Ibnu Taimiyah*, terj. Masroni, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

M. Amin Abdullah, *Antara Al- Ghozali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung, Mizan, 2002.

M. Arskal Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2010.

M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta Logos, 1999.

M. Hasan al-Jamal, *Hayatu al-A, Immatun*, terj. M. Khaled Muslih, Imam Awaluddin, *Biografi 10 Imam Besar* Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2005.

M. Hatta, *Alam Pemikiran Yunani*, Jakarta, Tintamas 1980.

Majalah, *Perencanaan Pembangunan*, Edisi, 24. Th. 2001. Oleh Yeremias T. Keban, Ph.D.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta, Preneta Media, 2004.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, UI- Press, 1993.

Naqd al-Mantiq, lihat Nurcholis Majid, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.

Nidal R. Sabrin, dan M. Hisyam Jabar, *Etika Bisnis dan Akuntan*, dalam Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta Bumi Aksara, 1997.

Peter Sirger, (ed), *Ethics*, Oxford University press, 1994.

Philip K. Hitti, *History of the Arabs; from the Earliest Time to the Present*, New York, Palgrave Macmillan, 2002.

S. Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung, Alumni, 1979.

Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharu Salafi dan Dakwah Reformasi*,
terj. Faisal Saleh, Khoerul Amru Harahap, Jakarta, Pustaka al-Kautsar,
2005.

Said Agil Husin Al-Munawar, *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*
Jakarta, PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.

Sindhunata, *Berfilsafat di Tengah Merebaknya Teror*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Suyuthi J. Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah
ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
1994.

Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara,
Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2008.

Taufiq Abdullah, Rusli Karim *Metodelogi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*,
Yogyakarta, Tiara Laksana: 1989.

Thomas Michel SJ, *Ibnu Taimiyah Alam Pikiran dan Pengaruhnya di
Dunia Islam, Orientasi*, 1983.